



Jernihkan Air, PDAM Beli Bahan Kimia Rp 8,7 Miliar

Mangupura (Bali Post) -

PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung membeli bahan kimia untuk menjernihkan air yang akan disalurkan ke masyarakat. Pengadaan bahan kimia berupa poly alumunium chloride dan gas clor tersebut dianggarkan Rp 8,7 miliar dan telah masuk tahap tender.

Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Ketut Golak, Minggu (13/1) kemarin menyampaikan, bahan kimia

ini untuk pengelolaan air bersih di dua kawasan, yakni di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belusung dan IPA Estuary Dam Produksi I. "Bahan kimia tersebut untuk menetralsir air agar layak disalurkan ke konsumen. Nilai tendernya sudah berdasarkan kajian, dan bahan kimia tersebut digunakan selama setahun," ungkapnya.

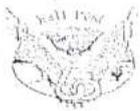
Dari data yang diperoleh di *web* lelang barang dan jasa Kabupaten Badung di Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung, ada dua bahan kimia yang ditenderkan, yakni bahan kimia poly alumunium chloride dan bahan kimia gas clor. Untuk poly alumunium chloride ditenderkan sebesar Rp 5 miliar, sedangkan gas clor senilai Rp 3,7 miliar. Tender dibuka sejak 10 Januari 2019. "Dengan produksi air bersih ini, tentunya ada target di tahun 2019 yakni kenaikan jumlah pelanggan," katanya.

Pejabat asal Desa Soban-

gan itu menerangkan, target untuk pelanggan baru di 2019 sebanyak 2.000 pelanggan. Saat ini pelanggan sebanyak 71.600 pelanggan. Jika target tersebut tercapai maka jumlah pelanggan di tahun 2019 akan sebanyak 73.600 pelanggan.

"Kajian usaha baru juga telah dilakukan seperti pembuatan air minum dalam kemasan. Semoga bisa dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga PDAM Badung bisa terus melakukan inovasi," jelasnya. (kmb27)



Korupsi Santunan Kematian

Dua Kadus Ditetapkan sebagai Tersangka

Negara (Bali Post) –

Setelah menjerat oknum PNS di Dinas Sosial Kabupaten Jembrana hingga ke meja hijau, Polres Jembrana pada Jumat (18/1) kemarin menetapkan dua oknum kepala dusun (kadus) di Desa Tukadaya Kecamatan Melaya menjadi tersangka kasus korupsi Santunan Kematian. Tersangka dengan inisial I Gede As dari Banjar Munduk Ranti dan IDKA dari Dusun Sarikuning Tulungagung ini diketahui bersekongkol dengan terpidana korupsi Indah Suryaningsih (oknum PNS) membuat data kematian fiktif dengan tujuan mencairkan dana santunan kematian.

Wakapolres Jembrana Kompol Komang Budiarta di Mapolres Jembrana kemarin mengatakan, penetapan I Gede As dan IDKA sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari tersangka sebelumnya yakni Indah Suryaningsih yang sudah lebih dulu divonis empat tahun enam bulan penjara.

Indah bertugas sebagai verifikator, yakni untuk memverifikasi dan memvalidasi dokumen pengajuan santunan kematian dari

masyarakat. Sedangkan dua tersangka kadus ini membuat pengajuan seolah-olah ada warga yang meninggal dunia. Setelah nanti dana santunan tersebut cair, maka akan dibagi sesuai peran masing-masing.

Pembagiannya, apabila Indah yang membuat dokumen fiktif, maka mendapatkan bagian Rp 1 juta dan kadus menerima masing-masing Rp 500 ribu. Namun bila dua kadus tersebut yang membuat dokumen fiktif

maka pembagiannya, Indah Rp 800 ribu dan kadus Rp 700 ribu.

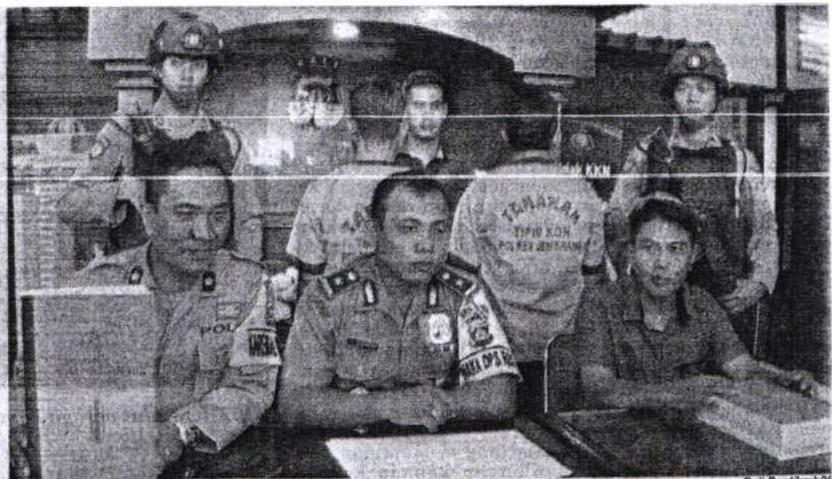
Santunan kematian yang merupakan program Pemkab Jembrana menganggarkan Rp 1,5 juta untuk setiap warga meninggal. Dengan adanya kerja sama ini, maka dana santunan ini bisa lolos hingga ratusan berkas. "Jadi mereka ini bekerja sama, Indah berperan untuk meloloskan," terang Budiarta.

Selama kurun waktu setahun mulai Januari sampai

Desember 2015, kerugian negara akibat ulah IDKA mencapai Rp 210 juta. Dengan 140 berkas fiktif pengajuan santunan kematian. Sementara I Gede As membuat negara rugi sebesar Rp 88 juta lebih.

Ditambahkan Budiarta, jumlah kerugian negara ini berdasarkan penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bali. Berkas fiktif yang diajukan beragam. Di antaranya ada berkas lama warga yang meninggal diajukan kembali, ada juga warga yang masih hidup dibuatkan berkas meninggal.

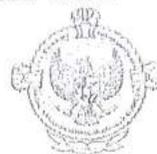
Selanjutnya, setelah penetapan tersangka ini, keduanya langsung ditahan dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. (kmb26)



KADUS KORUPSI - Dua oknum kadus ditetapkan oleh Sat Reskrim Polres Jembrana sebagai tersangka kasus korupsi santunan dana kematian

Edisi : sabtu, 19 Januari 2019

Hal : 10



✓ Dianggarkan Rp 1,8 Miliar, Dishub Tambah Alat Uji Kendaraan

Tabanan (Bali Post) -

Satu unit peralatan uji kendaraan (uji kir) tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan. Pengadaan peralatan uji kendaraan tersebut, saat ini masih persiapan proses lelang. Nilai anggaran yang dipasang sebesar Rp 1,8 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan Drs. I Made Agus Hartawiguna, Selasa (15/1) kemarin mengatakan, penambahan alat uji kir ini nantinya akan dilengkapi dengan elektronifikasi sistem sehingga lebih mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon. Dari data yang ada, dalam sehari rata-rata jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian di angka 80 sampai 100 unit kendaraan, didominasi angkutan barang. "Untuk pengadaan alat uji, saat ini sedang mempersiapkan tender, target pertengahan tahun sudah

ada alatnya," terangnya.

Namun demikian, sembari menunggu pemasangan penambahan alat uji, alat uji lama tetap dimanfaatkan. Selama ini, lanjut kata Agus, untuk kegiatan pengujian kelaikan kendaraan bermotor belum maksimal lantaran alat uji yang dimiliki belum lengkap. "Saat ini baru terpasang dan terkalibrasi yaitu *axi load* (timbangan) dan *break tester* (tes pengereman)," jelasnya.

Untuk memenuhi alat uji dasar di tahun ini akan dilengkapi beberapa alat uji lainnya, seperti *side slip tester with XG cabinet*, *gas analyzer with XG cabinet*, *diesel smoke tester*, *headlight tester*, dan *sound level tester*. "Sekalian nantinya kami akan lakukan elektronifikasi sistem, jadi lebih praktis lagi pelayanan ke masyarakat pemohon," ucapnya.

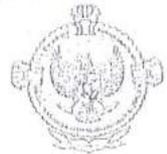
Menurutnya, penambahan alat uji ini merupakan upaya Pemkab Tabanan melalui Dishub untuk mewujudkan

pelayanan pengujian kendaraan, dalam menciptakan kendaraan yang berkesejahteraan. "Selama ini tetap dilayani dengan memanfaatkan tenaga petugas, sehingga akurasi dalam korelasi pelaksanaan pengujian belum optimal," terangnya.

Hal senada disampaikan petugas pengujian Ketut Pujiantara. Menurutnya, meski selama ini sudah ada alat uji kelaikan kendaraan, memang belum bisa sepenuhnya maksimal. Bahkan untuk pengujian juga ada bagian yang masih dicek secara kasat mata. Bahkan untuk pengujian emisi gas buang masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Di satu sisi jumlah kendaraan yang melakukan uji laik kendaraan rata-rata mencapai 100 unit tiap harinya. "Jadi nanti jika sudah datang penambahan alat uji, tentu sangat membantu sekali apalagi akan dilakukan secara sistem sehingga lebih praktis dan mudah," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal : 7



Perbekel Gadungan Dinonaktifkan Sementara

Tabanan (Bali Post) -

I Wayan Muliartana, Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur, per 7 Januari 2019 dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Hal ini menyusul ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli pada pertengahan Oktober 2018. Selanjutnya tugas dan kewajiban sebagai perbekel diambil alih Sekdes sampai ada putusan hukum tetap.

Penyerahan SK Bupati terkait pemberhentian sementara itu dilaksanakan Rabu (16/1) kemarin di ruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabanan, disaksikan Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa Roemi Liestyowati dan Camat Selemadeg Timur I Gusti Putu Ngurah Rai Darma Utama. Usai menerima SK penonaktifan sementara, Wayan Muliartana keluar dari ruangan Asisten II dengan raut wajah pasrah. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Bahkan setelah menenangkan diri selama beberapa menit di lobi kantor Bupati Tabanan, dia langsung bergegas pergi.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabanan I Wayan Miarsana menjelaskan, pemberhentian sementara perbekel diatur di salah satu pasal Perda No. 5 Tahun 2016. Intinya, perbekel yang terlibat kasus hukum akan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan hukum bersifat tetap (*inkracht*). Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menghadapi proses hukum. "Hak-hak



Bali Post/bit

DIBERHENTIKAN SEMENTARA - Wayan Muliartana (tengah) usai menerima SK pemberhentian sementara yang diserahkan oleh Asisten II Setda Tabanan Wayan Miarsana, Rabu (16/1) kemarin.

sebagai perbekel dihentikan sementara dan pelaksanaan tugas dilakukan oleh sekdes," imbuhnya.

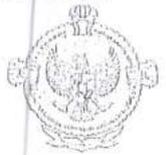
Jika dalam putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, maka haknya akan dikembalikan, termasuk direhabilitasi nama baiknya dan kembali menjadi perbekel. "Kami harap proses hukum bisa berjalan baik sesuai aturan," terangnya.

Miarsana menyebutkan, kejadian ini hendaknya jadi pembelajaran bagi para perbekel lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan desa. Apalagi pemerintah desa diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola desa dengan bantuan keuangan pusat yang nominalnya relatif besar. "Lebih intensif dan serius lagi mencermati ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa mulai APBDes serta administrasi keuangan desa dan mencermati apa saja kewenangan

desa. Jangan sampai keluar atau melampaui kewenangan yang dimiliki," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wayan Muliartana ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pungli galian C di Desa Gadungan. Pengungkapan kasus pungli ini bersumber atas laporan masyarakat yang menyebutkan Muliartana telah melakukan pemungutan retribusi pada truk yang melakukan pembelian galian C di desa setempat. Total pungutan mencapai Rp 13 juta.

Muliartana kala itu menjelaskan, masalah ini muncul akibat keteledoran dalam regulasi. Terkait pungutan retribusi tersebut, dia menyatakan sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak desa dengan pengusaha. Namun, dia mengakui kesepakatan ini tidak diperkuat dengan bukti hitam di atas putih. "Sebenarnya itu merupakan kontribusi atas kerusakan lingkungan dan infrastruktur," ujarnya. (kmb28)



WiFi Gratis Dipasang di Ratusan Titik

Bangli (Bali Post) -

Masyarakat di Kabupaten Bangli dalam waktu dekat akan bisa menikmati internet secara gratis. Sebab sesuai rencana, pemerintah akan melakukan pemasangan WiFi gratis di ratusan titik. Adapun tempat-tempat yang rencananya akan dipasang WiFi gratis yakni desa pakraman, puskesmas dan objek wisata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Komimfosan) Kabupaten Bangli Ni Wayan Manik mengatakan, pemasangan WiFi gratis di Kabupaten Bangli akan dilakukan tahun ini. WiFi gratis ini merupakan bantuan Pemprov Bali. Untuk memasang WiFi gratis di Bangli, anggaran yang disediakan Rp 1,190 miliar.

Total ada 218 titik yang rencananya akan dipasang WiFi gratis. Rinciannya 168 titik di wilayah desa pakraman, 12 titik di puskesmas dan 38 di objek wisata. "Titiknya sudah ditentukan Pemerintah Provinsi, sekarang masih sedang disurvei oleh Telkom," ujarnya.

Dijelaskan Manik, tujuan utama pemasangan WiFi gratis

untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi masyarakat. Di samping juga untuk mempercepat informasi pembangunan ke masyarakat. Menurutnya, di zaman seperti sekarang, internet sangat dibutuhkan untuk kepentingan banyak hal. "Dengan dipasang WiFi gratis, masyarakat bisa mengakses infor-

masi pembangunan pemerintah dengan cepat melalui media sosial misalnya," katanya.

Di sisi lain, Manik mengakui bahwa belum semua wilayah di Bangli bisa terjangkau sinyal seluler/internet alias *blank spot*. Kondisi itu menyebabkan masyarakat di wilayah itu kesulitan berkomunikasi melalui telepon seluler. Adapun wilayah yang dimaksud seperti Desa Siakin, Subaya dan beberapa wilayah lainnya di Kintamani.

Mengenai pemasangan WiFi gratis di daerah yang *blank spot*, dia mengatakan secara teknis hal itu akan ditangani PT Telkom sebagai pihak yang telah ditunjuk Pemprov sebagai rekanan. "Apakah mereka nanti membangun tower atau cara lainnya, itu nanti Telkom yang memikirkan," pungkasnya. (kmb40)

"Dengan dipasang WiFi gratis, masyarakat bisa mengakses informasi pembangunan pemerintah dengan cepat melalui media sosial, misalnya."

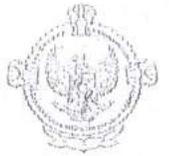
Kepala Dinas
Komimfosan Bangli
Ni Wayan Manik



Bali Post/kmb40

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal : 14



Olah Air Baku, PDAM Badung Belanja Bahan Kimia Rp 8,5 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Di awal 2019 ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Kabupaten Badung, memasang target meraup sebanyak 2.000 pelanggan baru. Demi mengejar target tersebut, berbagai upaya tengah dilakukan, salah satunya dengan mengoptimalkan pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belusung dan IPA Estuary.

Untuk itu, PDAM menyiapkan paket pertama pengadaan bahan kimia Poly Aluminium Chloride (PAC) untuk pengolahan di IPA Belusung dan IPA Estuary senilai Rp 4,9 miliar. Sedangkan paket kedua adalah pengadaan bahan kimia gas chlor untuk pengolahan di IPA Belusung dan IPA Estuary senilai Rp 3,6 miliar.

Saat ini, pengadaan tersebut telah masuk dalam proses tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. Tender telah dibuka sejak 10 Januari 2019, dan akan berakhir pada 17 Januari 2019.

Hingga Minggu (13/1) sore, sudah ada lima rekanan yang menyatakan berminat atas tender pengadaan bahan kimia gas chlor. Sedangkan, bahan kimia Poly Aluminium Chloride (PAC) masih nihil.

Kendati begitu, masih ada waktu hingga beberapa hari ke depan.

Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Ketut Golak, mengatakan pengadaan bahan kimia untuk pengolahan air bersih di IPA Belusung dan IPA Estuary yang terletak di Denpasar tersebut merupakan bagian dari mengoptimalkan pengolahan air. Menurut dia, dengan bahan kimia dapat menetralkan air agar layak disalurkan ke konsumen.

"Pengadaan bahan kimia ini untuk setahun dan sudah berdasarkan kajian. Sekarang sedang proses tender di LPSE," ucap Golak, Minggu (13/1).

Penjabat asal Desa Sobangan, Kecamatan Abiansemal, itu berharap dengan mengoptimalkan pengolahan air di IPA Belusung dan IPA Estuary, produksi air bersih lebih maksimal. Ini juga merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

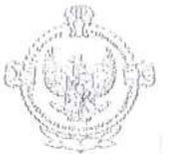
Menurut Golak, PDAM pada tahun 2019 menargetkan tambahan sebanyak 2.000 pelanggan baru. "Saat ini kami miliki 71.600 pelanggan. Jika nanti target 2.000 baru pada tahun 2019 tercapai, maka total sebanyak 73.600 pelanggan," kata Golak. **asa**



I Ketut Golak

Edisi : Senin, 14 Januari 2019

Hal : 2



RSUD Siapkan Gedung Rawat Inap Baru

★ Pemkab Pakai Dana dari Pinjaman Jangka Panjang

Areal parkir sementara dan gedung serta paviliun Mahottama akan dibongkar menjadi areal berdirinya bangunan rawat inap kelas 1 dan 2.

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng tengah merancang meminjam dana guna merealisasikan rencana pembangunan gedung rawat inap kelas 1 dan 2 RSUD Buleleng. Saat ini, Pemkab masih menghitung kebutuhan dana dalam pembangunan tersebut. Sambil menunggu kebutuhan dana, Pemkab juga akan menyiapkan draf Perda pinjaman dana tersebut sebagai dasar hukum.

Gedung rawat inap kelas 1 dan 2 akan dibangun di

sisi utara memanfaatkan lahan yang kini dijadikan areal parkir sementara. Dari areal ini, gedung rawat inap kelas 1 dan 2 di bangunan ke timur dengan dengan mengorbankan gedung rawat inap VIP Mahottama. Pavillium VIP Mahottama juga dibongkar. Sehingga nanti gedung rawat inap tersebut berdiri dengan dua atau tiga lantai. Saat ini, rencana pembangunan gedung rawat inap itu masih pra-design.

Nah, untuk bisa memban-

gun dalam satu tahun anggaran, Pemkab berencana meminjam dana ke salah satu BUMN yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pajaman itu memiliki waktu pengembalian yang cukup panjang bisa dengan 5 tahun anggaran. Di samping itu, bunga pinjaman juga dinilai cukup rendah.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dikonfirmasi Minggu (13/1) menjelaskan, meminjam dana kepada PT SMI menjadi salah satu alternative yang

paling realistis dalam melaksanakan pembangunan fisik dengan dana yang besar. Disebutkan, PT SMI menawarkan kredit lunak, yakni tingkat pelunasan ringan, bunga rendah, hingga berjangka waktu panjang.

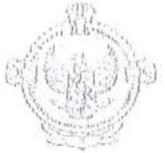
Baginya, melakukan pembangunan fisik dengan nilai yang besar dengan sistem pinjaman dari BUMN tersebut dirasakan akan lebih menguntungkan. "Ini lebih baik, kita pinjam di awal sehingga pembangunan itu mendapat kepastian anggaran

dan bisa dituntaskan sesuai rencana. Nanti tinggal menganggarkan nilai pengembalian tiap tahun anggaran," jelasnya.

Terkait dengan sejumlah persyaratan dan perangkat yang dibutuhkan termasuk Perda, Bupati Agus Suradnyana mengaku akan menyiapkan hal tersebut. Hanya saja saat ini, masih menunggu tahapan pra desain oleh pihak RSUD Buleleng untuk mengetahui kebutuhan dana secara pasti. "Perangkatnya dan Perdanya memang harus

kita siapkan. Yang pasti model aturannya diikuti saja, yang jelas semua sesuai regulasi," ujarnya.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana juga yakin jika kemampuan Keuangan daerah Buleleng mampu untuk membayar angsuran baik pokok termasuk bunga yang nantinya ditawarkan oleh PT SMI. "Karena bunganya lunak dan waktunya panjang bisa 5 tahun, Saya rasa bisa membayar angsuran pokok dan bunganya melalui APBD," imbuhnya. **k19**



Santuni Lansia, Badung Gelontor Rp 200 Miliar

Penerima Santunan Bertambah 3 Ribu Jiwa

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung menggelontorkan anggaran dari APBD induk 2019 sebesar Rp 200 miliar untuk program perlindungan sosial khusus lanjut usia (lansia). Sesuai data dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, total penerima santunan pada tahun ini bertambah sekitar 3 ribu jiwa. Sebelumnya pada 2018, penerima santunan sekitar 13 ribu jiwa, sekarang menjadi 16 ribu jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Ketut Sudarsana, mengatakan penerima santunan lansia di Gumi Keris mengalami peningkatan cukup signifikan lantaran bertambahnya usia warga Badung. "Tahun lalu yang usia 71 tahun, tahun ini memasuki usia 72 tahun. Jadi secara otomatis masuk kriteria penerima santunan," ujarnya, Rabu (16/1).

Sudarsana membantah bila membengkaknya data peneri-

ma santunan lansia, sebab ada warga tercecer dari pendataan sebelumnya. Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Badung itu menegaskan jika penambahan data penerima santunan lansia lantaran banyak warga Badung yang masuk usia 72 tahun. "Jadi, saya tegas tidak ada warga tercecer. Karena faktor bertambahnya usia saja," tandasnya.

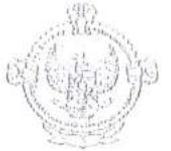
Pada 2019, lanjut Sudarsana, total anggaran untuk menyantuni lansia senilai Rp 200 miliar yang bersumber dari APBD induk. "Ini diproyeksikan untuk satu tahun anggaran, tapi tetap kami akan evaluasi pada APBD perubahan 2019 nanti," katanya. Dikatakannya, total anggaran santunan lansia pada 2018 sebesar Rp 54 miliar, santunan mulai diberikan per September 2018.

Mengenai nominal santunan tetap tidak ada perubahan, yakni Rp 1 juta per orang.

Pancairan bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.

Bantuan perlindungan sosial untuk lansia ini merujuk Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2018. Mereka yang masuk kriteria penerima santunan lansia adalah lansia paling rendah berumur 72 tahun atau lansia berumur 60 tahun ke atas yang masuk kategori tidak berdaya (*bedridden*).

Adapun persyaratan pendukung, yakni penerima sedang tidak menerima pensiun/santunan pemerintah maupun lembaga sosial, dan bukan lanjut usia yang menjadi binan dan tanggung jawab panti sosial Tresna Werdha atau panti sosial. Memiliki KTP Badung, fotokopi KK Kabupaten Badung yang tercantum nama lansia, fotokopi buku tabungan BPD Bali atas nama lansia penerima. **asa**



Terkait Perbekel Celukan Bawang Tersangka PMD Koordinasi ke Kejaksaan

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, terkait penetapan Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Muhammad Ashari sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang. Koordinasi tersebut dalam rangka memastikan penetapan Perbekel Ashari sebagai tersangka.

"Kami belum bisa memastikan, kami akan koordinasikan dulu ke Kejaksaan, karena belum ada tembusan surat penetapan itu, jadi kami akan cek kebenarannya," kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Made Subur saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/1).

Didesak jika Perbekel Ashari benar ditetapkan sebagai tersangka, Subur menyebut, pihaknya akan membuat kajian terkait pemberhentian sebagai perbekel. Kajian ini terkait ancaman hukuman. "Apabila surat dari kejaksaan dengan status sebagai tersangka sudah keluar, maka kami akan membuat sebuah kajian. Kalau disangkakan lebih dari lima tahun ya diberhentikan. Pemberhentian sementara juga ada. Jadi mohon maaf saja, sebab Senin baru saya akan melakukan jemput bola mendatangi Kejari," jelasnya.

Menurut Subur, proses pemberhentian dapat dilakukan setelah ada keputusan ikrah dari Pengadilan. Selama proses hukum di Pengadilan, menghindari kekosongan jabatan

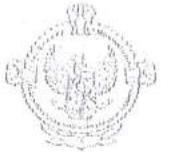
maka jabatan perbekel akan diisi dengan Plt. Ashari diperkirakan masa jabatannya sampai tahun 2019 ini.

Sementara ditempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana juga mengaku belum mendapat surat tembusan penetapan Perbekel Ashari sebagai tersangka. Namun jika benar telah ditetapkan sebagai tersangka, Ashari disarankan mematuhi proses hukum yang ada. "Saya belum baca surat tembusannya. Saya baca di media beliau jadi tersangka, ya saya sarankan ikuti saja proses hukum dan semua akan berjalan sesuai mekanisme," katanya singkat.

Sebelumnya, Perbekel Celukan Bawang, Muhammad Ashari telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 3

Januari 2019 lalu. Penetapan tersangka setelah tim Kejari Buleleng mengantongi nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Diduga ada *mark up* dalam pembangunan kantor desa senilai Rp 295.525.990, sebagai kerugian negara.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng, Wayan Genip tidak menampik pihaknya telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Desa Celukan Bawang. Hanya saja, Genip menyebut tersangkanya berinisial MA. Konon inisial MA itu adalah nama Muhamad Ashari. "Mang sudah kami tetapkan tersangkanya berinisial MA. Sekarang kami masih melengkapi berkas keterangan saksi-saksi," katanya. k19



Kasus OTT Tirta Empul Penyidik Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

GIANYAR, NusaBali

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap petugas tiket Pura Tirta Empul belum rampung. Polisi masih menantikan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Gianyar. Setelah perhitungan rampung, barulah Polres Gianyar melakukan langkah lanjutan.

Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo, menyatakan kasus ini kini tengah menantikan Inspektorat. "Itu masih di Inspektorat," tegas

Priyanto. Ditanya kenapa harus membidik bendesa bukan petugas tiket saja, Priyanto mengaku yang bertanggung jawab adalah prajuru paling atas. "Kami kan membidik yang bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Deny Septiawan, mengaku telah meminta keterangan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) sebagai saksi ahli. "Pemeriksaan hampir rampung, kami tinggal menunggu perhitungan dari Inspektorat," ujarnya.

Kata dia, dari hasil Inspektorat itu, polisi akan mempelajari apakah ada unsur kerugian negara atau tidak. "Memang disana ada kerugian negara, tapi penghitungannya masih kita tunggu inspektorat. Apakah digunakan sendiri, untuk kepentingan desa adat atau kepentingan lain. Kami cek melalui Inspektorat," jelasnya.

Deny mengaku, penanganan kasus korupsi memang butuh waktu yang lebih lama ketimbang kasus pidana lainnya. "Penanganan banyak

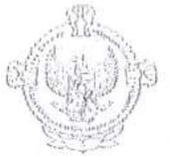
prosedur, banyak orang yang dimintai keterangan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, Made Juanda, menyatakan pihaknya bukan melakukan audit namun menghitung berapa dana penjualan tiket yang masuk ke kabupaten. "Kami hanya diminta untuk menghitung berapa yang masuk ke kas daerah," jelasnya.

Pihaknya tidak mau menyebutkan berapa rincian dana yang masuk ke kas daerah. Kini pihaknya sedang menunggu

petunjuk dari bupati Gianyar perilah tindakan selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, dua petugas tiket di Pura Tirta Empul terjaring OTT oleh Satgas Saber Pungli pada 6 November 2018 lalu. Polisi mengamankan tiket yang diterbitkan desa pakraman Manukaya Let. Polisi juga menyita uang tunai yang diduga sebagai hasil penjualan tiket itu. Selanjutnya, dua petugas tiket dibebaskan, dan polisi merilis bendesa Manukaya Let sebagai calon tersangka. nvi



Defisit, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas

Anggaran perjalanan dinas Pemkab Tabanan semula diusulkan Rp 38 miliar, namun ditetapkan sebesar Rp 24,8 miliar.

TABANAN, NusaBali

Akibat defisit anggaran, perjalanan dinas untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tabanan terpangkas. Mulanya dirancang sebesar Rp 38 miliar, namun dikurangi Rp 13,2 miliar, sehingga hasil akhir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 24,8 miliar.

Meski demikian diakui tidak sampai mengganggu kinerja pemerintahan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bepelitbang) Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja membenarkan hal tersebut. Mulanya dirancang sebesar Rp 38 miliar, tetapi ada pengurangan sebesar Rp 13,2 miliar atau 34 persen. "Nggih, dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan teknis yang efektif dan efisien," ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (15/1).

Wiratmaja mengakui, pengurangan anggaran perjalanan dinas selain karena untuk memenuhi kebutuhan dana mandatori sesuai aturan pusat, juga untuk memenuhi kebijakan bidang pendidikan, ke-

bijakan bidang kesehatan, kebijakan urusan pilihan dalam rangka membangun pondasi ekonomi masyarakat. "Bahasanya tidak dipotong atau dipangkas. Sekalipun tidak ada kebijakan tentang mandatori, tetap saja harus dilakukan penyesuaian terhadap semua pos anggaran termasuk perjalanan dinas," tuturnya.

Dilanjutkan, hal tersebut karena semua usulan dari masing-masing OPD harus dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dasar kajian TAPD itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan mendesak akibat anggaran yang memang klise selalu saja terbatas. Jadi TAPD merasionalisasi usulan OPD agar benar-benar efektif dan efisien serta sesuai peraturan

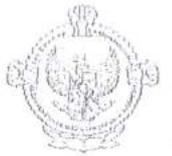
perundang-undangan. Setelah rasionalisasi maka TAPD akan memploting kembali untuk kegiatan lain dipandang urgen dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

"Lalu setelah diploting kembali, disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan mandatori, kebijakan bidang pendidikan, kebijakan bidang kesehatan, kebijakan urusan pilihan dalam rangka membangun pondasi ekonomi masyarakat," beber Wiratmaja.

Diakui dengan terjadi pengurangan tersebut tidak sampai mengganggu kinerja di pemerintahan. "Tidak terganggu karena seharusnya tidak ada kaitannya kinerja dengan perjalanan dinas," tandasnya. **de**

Edisi : 16 Januari 2019

Hal : 11



Dishub Tabanan Tambah Alat Uji Kir Senilai Rp 1,8 M



UJI kir kendaraan di Dinas Perhubungan Tabanan, Selasa (15/1).

TABANAN, NusaBali

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tabanan akan menambah satu unit alat uji kir kendaraan bermotor. Saat ini penambahan alat uji kir yang anggarannya dipasang Rp 1,8 miliar masih tahap proses lelang. Ditarget alat akan dipasang pertengahan 2019.

Kepala Dishub Kabupaten Tabanan I Made Agus Harta Wiguna, menjelaskan penambahan alat uji kir ini nantinya akan dilengkapi dengan elektronifikasi sistem. Sehingga lebih mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon. Di mana dalam sehari rata-rata jumlah kend-

araan yang dilakukan pengujian di angka 80 sampai 100 unit yang didominasi kendaraan angkutan barang. "Untuk pengadaan alat uji, saat ini sedang mempersiapkan tender, target pertengahan tahun sudah ada alatnya," ujar Harta Wiguna, Selasa (15/1).

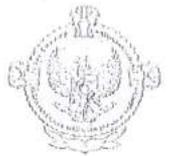
Dikatakannya, penambahan alat uji kir dilakukan karena untuk kegiatan pengujian kelaikan kendaraan bermotor alatnya kurang lengkap. Karena yang baru terpasang dan terkalibrasi adalah *axle load* (timbangan) dan *break tester* (tes pengereman).

Sedangkan alat uji yang akan datang ini akan dilengkapi beberapa alat uji lainnya

seperti *side slip tester with XG cabinet*, *gas analyzer with XG cabinet*, *diesel smoke tester*, *headlight tester*, dan *sound level tester*. "Dan sekaligus nantinya kami akan lakukan elektronifikasi sistem, jadi lebih praktis lagi pelayanan ke masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya penambahan alat uji ini merupakan upaya Pemkab Tabanan untuk mewujudkan pelayanan pengujian kendaraan, dalam menciptakan kendaraan yang berkeselamatan. "Selama ini tetap dilayani dengan memanfaatkan tenaga petugas, hanya saja akurasi dalam korelasi pelaksanaan pengujian belum optimal," jelasnya.

Hal senada disampaikan petugas pengujian Ketut Pujiantara. Menurutnya, meski selama ini sudah alat uji kelaikan kendaraan, memang belum bisa maksimal. Untuk pengujian juga ada bagian yang masih dicek secara kasat mata. Bahkan untuk pengujian emisi gas buang masih bekerjasama dengan pihak ketiga. Di satu sisi jumlah kendaraan yang melakukan uji laik kendaraan rata-rata mencapai 100 unit tiap harinya. "Jadi nanti jika sudah datang penambahan alat uji, tentu sangat membantu," tandasnya. **de**



Sambungan

ruang kerjanya Selasa (15/1) tidak menampik pihaknya telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Desa Celukan Bawang. Hanya saja, Genip menyebut tersangkanya berinisial MA. Konon inisial MA itu adalah nama Muhamad Ashari. "Memang sudah kami tetapkan tersangkanya berinisial MA. Sekarang kami masih melengkapi berkas keterangan saksi-saksi," katanya.

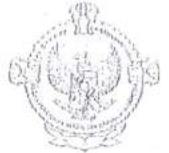
Kasis Pindsus Genip mengaku, penetapan tersangka MA setelah pihaknya mengantongi bukti, keterangan dan nilai kerugian dalam kasus tersebut. Bahkan, pihaknya sempat melakukan cek fisik

terhadap bangunan kantor desa. Rencananya, tersangka MA akan dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Mudah-mudahan dalam waktu segera kami akan panggil MA, sekarang kami masih melengkapi berkas pemeriksaan saksi-saksi," akunya.

Sementara Perbekel Celukan Bawang, Muhamad Ashari dikonfirmasi melalui sambungan telepon enggan berkomentar. Ia memilih tidak berkomentar agar tidak timbulkan persepsi lain. "Saya tidak mau berkomentar. Mohon kalau bisa tidak perlu diisi konfirmasi lagi. Anggap tidak bisa dikonfirmasi," katanya singkat. **k19**

Edisi : _____

Hal : _____



Perbekel Celukan Bawang Tersangka

★ Kasus Dugaan Markup Pembangunan Kantor Desa

"Memang sudah kami tetapkan tersangkanya berinisial MA. Sekarang kami masih melengkapi berkas keterangan saksi-saksi"

(Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip)

SINGARAJA, NusaBali
Kepala Desa (Perbekel)
Celukan Bawang, Kecamatan

Gerokgak, Buleleng, Muhamad Ashari disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan kantor desa. Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng kini tengah melengkapi berkas pemeriksaan guna pemanggilan tersangka Ashari.

Informasi dihimpun, Ashari ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 3 Januari 2019 lalu. Penetapan tersangka setelah tim Kejari Buleleng mengantongi nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Diduga ada markup dalam pembangunan kantor desa senilai Rp 295.525.990, sebagai kerugian negara.

Kasus yang membelit Per-

bekel Ashari bermula ketika pihak PLTU Celukang Bawang yakni PT General Energi Bali (GEB), membayarkan dana ganti rugi bangunan kantor desa, sekitar tahun 2014 silam. Pembayaran dana ganti rugi itu, karena lahan dan bangunan Kantor Desa Celukan Bawang di Dusun Punggukan, ikut dibebaskan oleh PT GEB sebagai areal pembangkit listrik.

Untuk lahan, pihak PT GEB telah membelikan lahan di Dusun Celukan Bawang dengan luasan yang sama dengan luasan kantor desa sebelumnya. Sedangkan untuk bangunan kantor desa, PT GEB memberikan dana ganti rugi. Konon, besaran dana ganti rugi ban-

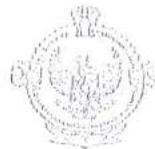
gunan kantor desa itu sekitar Rp 1,1 miliar. Dana ganti rugi itu dibayarkan PT GEB melalui rekening Ashari.

Dana tersebut dipakai membangun kantor desa. Hanya saja, dalam pembangunan itu, tidak melalui proses tender di unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa. Kabarnya, Perbekel Ashari menunjuk langsung rekanan yang disebut-sebut bernama CV Hikmah Lagas. Selain gedung kantor desa, CV Hikmah Lagas juga ditunjuk mengerjakan pagar kantor desa tanpa proses tender. Selain kegagalan tersebut, tim Kejari Buleleng juga menilai kedua proyek tersebut tidak sampai sebesar Rp 1 miliar.



PERBEKEL Celukan Bawang Muhamad Ashari.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng, Wayan Genip dikonfirmasi di



Dihukum Kasus Korupsi, Lima PNS Diberhentikan

"Jadi, khusus dalam keterlibatan dua tersangka yang kami tahan saat ini, total menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 298.500.000,"

NEGARA, NusaBali

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Jembrana, melakukan penahanan terhadap mantan Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa, 48, dan mantan Kelian Dinas Banjar Sarikuning Tulung Agung, I Dewa Ketut Artawan, 52, di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015. Kedua tersangka itu merupakan tersangka susulan dari tersangka sebelumnya, yakni seorang oknum PNS Pemkab Jembrana, Indah Suryaningsih, 48, yang

telah divonis 4 tahun penjara oleh pihak Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/8) lalu.

Wakapolres Jembrana, Kompol Komang Budiarta, didampingi Kabag Ops Polres Jembrana, Kompol M Didik Wiratmoko, saat rilis kasus di Mapolres Jembrana, Jumat (18/1), mengatakan, kedua tersangka yang mantan Kelian Banjar ini, telah ditahan sejak Senin (14/1) lalu. Penahan itu dilakukan setelah berkas perkara kedua tersangka yang diajukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara telah dinyatakan lengkap atau P-21. "Berkasnya sudah lengkap, jadi untuk tersangka kami tahan untuk persiapan pelimpahan tahap dua ke Kejari Negara pekan depan," ujarnya.

Menurutnya, kedua tersangka ini, terbukti bekerjasama dengan Indah Suryaningsih, yang melakukan pengajuan berkas fiktif dana santunan kematian tahun 2015. Sebelum pengajuan berkas, antara Indah Suryaningsih yang sebelumnya menjadi petugas bagian penerimaan serta verifikasi dana santunan kematian di Dinas Kesejahter-

aan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Kesosnakertrans) Jembrana, bersama Dewa Ketut Artawan dan Gede Astawa sudah membuat kesepakatan pembagian setiap berkas fiktif yang sudah dicairkan dananya.

Dari pencairan dana sebesar Rp 1,5 juta per berkas, apabila berkas dibuat langsung oleh Indah Suryaningsih, maka Gede Astawa dan

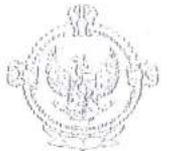
Dewa Ketut Artawan yang bertugas menandatangani permohonan berkas, masing-masing mendapat bagian Rp 500 ribu, dan Indah Suryaningsih mendapat Rp 1 juta. Sedangkan jika berkas dibuat langsung oleh Gede Astawa dan Dewa Ketut Artawan, masing-masing mendapat bagian Rp 700 ribu, dan Indah Suryaningsih mendapat bagian Rp 800 ribu.

Sesuai hasil penyidikan, Gede Astawa bersama Indah Suryaningsih, diketahui melakukan pengajuan sebanyak 59 berkas fiktif, dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 88.500.000. Sedangkan, Dewa Ketut Artawan bersama Indah Suryaningsih, mengajukan sebanyak 140 berkas fiktif, dan merugikan kerugian negara Rp 210 juta. "Jadi, khusus dalam keterlibatan dua tersangka yang kami tahan saat ini, total menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 298.500.000," ujar Kompol Budiarta.

Kedua tersangka yang sama-sama mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya, ini sama-sama dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 yo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mereka diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 tahun hingga 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar (Pasal 2 ayat 1), dan pidana penjara seumur hidup atau pidana 1 tahun hingga 20 tahun dan atau denda Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 3). **ode**



WAKAPOLRES Jembrana, Kompol Komang Budiarta (tengah), didampingi Kabag Ops Polres Jembrana, Kompol M Didik Wiratmoko (kiri), saat rilis terkait penahanan dua mantan Kelian Dinas tersangka kasus dugaan korupsi dana santunan kematian tahun 2015, di Mapolres Jembrana, Jumat (18/1)



400 Penerima Hibah Belum Setor LPJ

SEMARAPURA, NusaBali

Sedikitnya 400 kelompok, dari 663 kelompok penerima bantuan hibah tahun 2018 di Klungkung, belum menyetorkan pertanggungjawaban yang berakhir, 10 Januari 2019. Keterlambatan seperti ini merupakan tradisi atau pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya.

Informasi yang dihimpun, keterlambatan mengumpulkan laporan tersebut karena pengerjaan kegiatan yang didanai dari dana hibah itu juga mengalami keterlambatan. Padahal penyusunan laporan pertanggungjawaban ini tidak sulit karena sudah ditentukan format dan sudah disosialisasikan jauh-jauh sebelumnya.

Adapun bansos yang direalisasikan pada 2018 sebesar Rp 58 miliar untuk 663 objek. Di antaranya, untuk urusan kebudayaan berupa pembangunan wantilan, rehab pura, dan lainnya. Namun ketika batas terakhir pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) per 10 Januari 2019. Ternyata masih banyak yang belum menyetor LPJ.

"Dari 663 penerima dana hibah di Klungkung yang baru menyetor SPJ hanya 263 penerima dana hibah atau 39,6 persen," ujar Plt Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung (BPKPD), Wayan Sumarta, Senin (13/1).

Kata Sumarta, sesuai Perbub Nomor 12 Tahun 2017 atas perubahan Perbup Nomer No 30 Tahun 2016 terkait Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos, SPJ paling lambat harus disetor pada 10 Januari. Namun Sumarta belum berani memastikan alasan dari penerima hibah sampai sekarang belum bisa menyetor LPJ. "Kami tidak tahu alasan penerima hibah ini hingga terlambat menyetor laporan pertanggungjawabannya," ujar Sumarta.

Di samping itu OPD terkait yang memfasilitasi juga belum ada memberi tahu alasan keterlambatan ini.

Pada saat pembuatan LPJ ini sebenarnya tidak sulit, karena format sudah ditentukan dan disosialisasikan kepada penerima hibah. Untuk sanksi keterlambatan ini dilakukan di internal dulu." Apabila ada penyimpangan anggaran bisa diproses hukum," tegasnya. Tahun 2018, Klungkung menganggarkan hibah Rp 63 miliar dengan relisasi Rp 58 miliar. Sedangkan dana bansos dianggarkan Rp 2,4 miliar, namun realisasinya Rp 2,06 miliar. **wan**



Perwakilan penerima dana hibah dan bansos mengikuti sosialisasi di Kantor Camat Dawan, Klungkung, beberapa waktu lalu. • IST

Edisi : Selasa, 15 Januari 2019

Hal : 6



Proyek Eskalator Pasar Semarapura Gagal Tender

SEMARAPURA, NusaBali

Proyek pengadaan eskalator (tangga berjalan) di Blok A Pasar Semarapura, Klungkung, gagal tender pada tahap pertama. Karena saat pengumuman lelang dilakukan 18-31 Desember 2018, dari 7 rekanan yang daftar tidak ada satu pun yang masuk dalam penawaran alias hanya ngintip saja.

Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Klungkung, kembali membuka pengumuman tender tahap kedua pada 9-16 Januari 2019. Hingga kemarin sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi belum ada yang mengajukan penawaran. Padahal batas terakhir pengumuman tahap kedua ini pada, Rabu (16/1) hari ini.

Apabila gagal tender lagi, maka akan dibuka pengumuman tahap ketiga. Di satu sisi jika ada satu saja yang mengajukan penawaran dari 18 rekanan tersebut, dan jika memenuhi persyaratan yang bersangkutan bisa langsung jadi pemenang.

Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana mengatakan proyek pengadaan eskalator ini dianggarkan Rp 1,5 miliar untuk harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 1.499.313.299, yang sudah satu paket dengan pemasangan CCTV dan sound system.

Lelang pada tahap pertama sudah dilakukan 18-31 Desember 2018 tapi gagal tender, karena dari 7 rekanan yang datar tidak ada yang mengajukan penawaran. "Istilahnya mereka (rekanan) baru ngintip saja," ujar Agung Lesmana saat ditemui, Selasa (15/1).

Kata Agung Lesmana, pengumuman tender tahap kedua 9-16 Januari 2019 sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan penawaran. "Kalau ada satu saja yang mengajukan penawaran, dan jika memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan bisa menjadi pemenang tender," ujarnya.



• NUSABALI/DEWA DARMAWAN
Kernegahan bangunan Blok A Pasar Semarapura, Klungkung, Selasa (15/1).

Nihilnya rekanan yang mengajukan penawaran ini diperkirakan karena rekanan penyedia eskalator ini lebih banyak mengambil proyek dari pemerintah mereka masih berfikir untuk mengambilnya. Sedangkan penyedia di Bali masih minim, diketahui hanya ada 1 rekanan penyedia eskalator. "Kami akan melakukan analisis, apabila tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran pada tahap kedua ini," ujarnya.

Jika tender tahap kedua ini kembali gagal, maka sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih bisa dilakukan pengumuman tender lagi hingga Juni-Juli 2019. Namun di satu sisi pembangunan Blok A Pasar Semarapura dengan desain modern ini sekaligus pada saat moment HUT Kota Semarapura, HUT Puputan Klungkung dan Festival Semarapura pada April 2019.

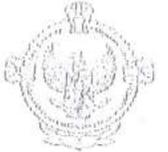
"Setelah ada penawaran itupun kembali berproses selama 1 bulan, baru bisa pengerjaan proyek dengan batas waktu 180 hari (6 bulan)," katanya. Pasar Semarapura Blok A dibangun kembali dengan anggaran APBD Klungkung tahun 2018 sekitar Rp 11 miliar sudah kelar Desember 2018.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Klungkung, Wayan Ardiasa, mengatakan blok A Pasar Semarapura akan disulap menjadi pasar tradisional berkonsep pasar modern dengan menjual produk UMKM seperti hasil kerajinan rumah tangga.

Ardiasa, pejabat asal Jembrana ini juga menyampaikan, Blok A juga sudah dilengkapi ruang pameran, nantinya ada momen-momen tertentu akan diadakan pameran produk UMKM. Fasilitas publik lainnya yang sudah disiapkan seperti ruang menyusui, toilet untuk pria dan toilet wanita, akses penyandang disabilitas, ruang merokok (smoking area). Untuk retribusi setiap kios membayar sebesar Rp 5.000/hari. **wan**

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal : 11



Sambungan

pekerjaan yang sudah diselesaikan akan dilunasi melalui APBD Perubahan 2019. Hal ini karena masa pengerjaan RTH melampaui tahun anggaran 2018. Pembayaran itu pun harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Berapa sisa pembayaran itu, masih kami hitung," ujarnya.

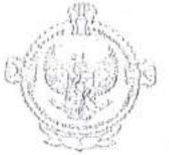
Lebih lanjut Melanderat menyebut, kelanjutan proyek pengerjaan RTH Rujab tersebut akan dianggarkan kembali sebagai pembangunan tahap kedua. Jika nanti kebutuhan dananya di bawah Rp 200 juta, bisa dilakukan penunjukkan langsung.

Seperti diketahui, proyek RTH Runjab Bupati, diketahui selama ini molor dari kontrak kerja. Semestinya, proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,347 miliar, rampung pada tanggal 25 November 2018 lalu.

Pihak rekanan yakni CV Arya Utama Dewata, telah diberi perpanjangan waktu 50 hari kalender hingga tanggal 14 Januari 2019, untuk menuntaskan pekerjaan tersebut, namun hasilnya gagal tuntas 100 persen. **k19**

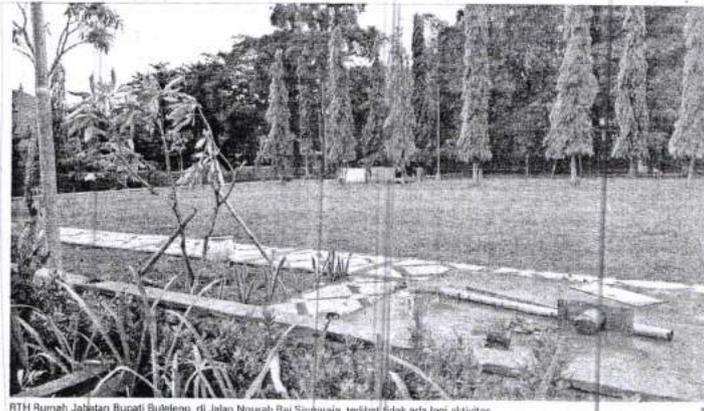
Edisi : _____

Hal : _____



Proyek Ruang Terbuka Hijau Rujab Tak Tuntas

★ Kontraktor Masuk Daftar Hitam



RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng, di Jalan Ngurah Rai Singaraja, terlihat tidak ada lagi aktivitas.

Penambahan waktu 50 hari belum bisa dioptimalkan pihak kontraktor sehingga masuk daftar hitam tak boleh ikut tender lagi.

SINGARAJA, NusaBali

Meski telah diberikan perpanjangan waktu, pekerjaan ruang terbuka hijau (RTH) di areal rumah jabatan (Rujab) Bupati, Jalan Ngurah Rai Singaraja, tetap juga tidak rampung. Tak ayal pihak rekanan CV Arya Dewata Utama dijatuhkan sanksi pemutusan kontrak hingga sanksi *blacklist* alias masuk daftar hitam.

Sesuai jadwal, proyek tersebut harusnya telah rampung 100 persen, sesuai tambahan waktu 50 hari kalender, per tanggal 14 Januari 2019. Namun, hasil penilaian pihak konsultan pengawas,

ternyata pihak rekanan menyisakan pekerjaan 1 persen lebih.

Melihat hasil tersebut, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Buleleng selaku pemilik kegiatan, memutuskan kontrak pekerjaan hingga menjatuhkan sanksi *blacklist* terhadap rekanan CV Arya Dewata Utama.

Pantauan di lokasi tidak ada lagi aktivitas kegiatan di RTH Rujab Bupati. Di beberapa sudut terlihat pekerjaan masih tersisa seperti pemasangan batu sikat. Selain itu terlihat juga tumpukan material sisa bahan bangunan yang belum dibersihkan.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Perkimta Buleleng, Gede Melanderat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan hasil penilaian konsultan pengawas, pihak rekanan hanya merealisasikan pekerjaan fisik hingga 14 Januari 2019 mencapai 98,829 persen.

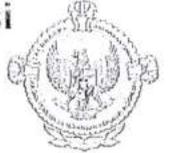
Disebutkan, beberapa pekerjaan yang belum rampung mulai pemasangan koral sikat, tempelan paras, paving di tempat duduk, serta be-

berapa pekerjaan item lain dengan bobot kecil. "Konsekuensinya pemutusan kontrak,

rekanan kena *blacklist* tidak boleh mengambil pekerjaan di LKPP Buleleng," katanya.

LKPP sendiri adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut Melanderat, karena keterlambatan tersebut, sisa pembayaran terhadap



Badung Defisit APBD Rp 700 Miliar Lebih

Buntut Melesetnya Target Pendapatan

MANGUPURA - Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Badung mengalami defisit Rp 700 miliar. Penyebabnya, target pendapatan Badung di tahun 2018 ini meleset. Dampaknya, banyak proyek yang molor dan bahkan penundaan dalam pembayaran. Selain itu, bantuan hibah juga banyak yang tidak cair.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, target pajak pada APBD induk 2018 terpasang Rp 4,9 triliun lebih. Kemudian pada APBD Perubahan dikoreksi menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Ada 10 jenis pajak yang ditarik Bapenda Badung, yaitu pajak hotel, restaurant, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, reklame, PBB dan BPHTB. Dari 10 jenis pajak tersebut seluruhnya tidak mencapai target.

Misalnya, pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 3,8 triliun lebih, pajak restaurant yang di target Rp 645,7 miliar, terealisasi Rp 594,2 miliar lebih, selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp 75,7 miliar terealisasi Rp 70,9 miliar lebih. Pajak reklame realisasinya paling kecil, yakni dari target Rp 14 miliar, baru terealisasi Rp 2,3 miliar lebih.

Realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Sementara penerimaan sisa lebih penggunaan anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 676 miliar lebih. Dana Silpa ini juga untuk memenuhi kekurangan APBD 2018 tetapi masih tetap saja mengalami defisit. "Dari target Rp 4,1 miliar, per 20

Desember lalu sudah tercapai Rp 3,8 miliar lebih," Kepala Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutarna belum lama ini.

Dalihnya, kondisi pariwisata Bali yang mengalami banyak gangguan. Terutama pemulihan pasca erupsi Gunung Agung yang memicu turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada awal tahun 2018. Selain itu, adanya gangguan keamanan seperti isu bom oleh kelompok terorisme, bencana gempa bumi di Lombok dan isu penyebaran penyakit rabies dan *Japanese encephalitis* turut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali, isu mafia Tiongkok dan lainnya. Para peserta IMF-Bank Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu tak dikenakan pajak hotel. "Penurunan jumlah kunjungan wisatawan berdampak langsung pada penurunan penerimaan realisasi pajak daerah," terang Birokrat asal Desa Pecatu tersebut.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Ketut Gede Suyasa, mengakui pendapatan meleset. Karena dari target pendapatan sudah termasuk pajak dan dana transfer totalnya mencapai Rp 7,5 triliun lebih. "Hanya terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5,2 triliun atau hanya mencapai 69, 74 persen," ungkapnya dikonfirmasi terpisah, Jumat (11/1).

Kontan pendapatan tidak terpenuhi berpengaruh terhadap APBD Badung. Bahkan untuk tahun 2018 ini, APBD Badung mengalami defisit anggaran ratusan miliar rupiah. "Per 31 Desember 2018 (defisit) sekitar Rp 700 miliar," jelas Gede Suyasa. (dwi/rid)

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 11



Radar Bali

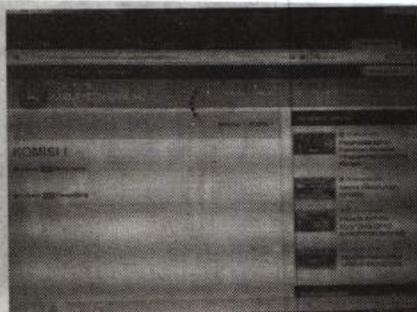
Mengintip Website OPD di Pemkab Badung yang Masih Digarap Asal-asalan

Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah melaunching Badung Command Center (BCC) belum lama ini. BCC ini sebagai pusat komando dan juga data center dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Badung. Sayangnya, masih banyak website OPD yang digarap asal-asalan.

WEBSITE Pemkab Badung itu beralamat di www.badungkab.go.id. Di dalam website ini, sedikitnya ada 72 subdomain dari organisasi perangkat daerah di Pemkab Badung. Dari kecamatan, kantor, dinas dan badan. Dari pantauan Koran ini, ternyata masih banyak data yang dibutuhkan tapi belum tersedia, sehingga perlu diupdate ulang.

Sebagai contoh saja, website di Dinas



MADE DWIJA PUTRA/RADAR BALI

BELUM TERISI: Nama-nama anggota Komisi DPRD Badung sama sekali belum terisi alias kosong di website sekretariat DPRD Badung hingga kemarin.

Kesehatan Badung belum berisi jumlah Puskesmas di Badung, nama kepala Puskesmas, berapa ada dokter dan perawat, dan lain sebagainya. Begitu juga website Sekretariat DPRD Badung juga sama. Nama-nama anggota Komisi dari I sampai IV juga sama sekali tidak terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

periode ini sudah memasuki masa bhakti empat tahun, bahkan sebentar lagi Pemilu. Secara umum, konten di masing-masing OPD ini kurang update, baik berita atau informasi lainnya, juga miskin konten.

Kepala Dinas Kominfo Badung Badung I Wayan Weda Dharmaja tak menampik kondisi ini. Untuk itu pihaknya meminta agar semua perangkat daerah dapat mengisi data sesuai dengan tupoksinya dalam konten yang tersedia. "Sehingga masyarakat luas dapat mengakses data yang diperlukan seperti jumlah penduduk di Badung, tempat wisata dan sebagainya," terangnya.

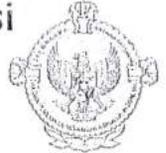
Bila data-data ini sudah terkumpul, maka pihaknya memastikan seluruh data terintegrasi semua. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses. "Tujuan awal memang seperti itu bagaimana supaya seluruh data dapat terintegrasi. Mengenai hal ini sebetulnya telah

kita bahas dalam rapat konsolidasi beberapa waktu lalu. Bapak Wakil Bupati juga hadir langsung waktu itu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Badung juga telah membangun Badung Command Center (BCC) sebagai pusat terintegrasinya semua data dari OPD di Kabupaten Badung. BCC ini juga merupakan pusat akses data serta pusat penyediaan informasi yang mudah dijangkau, akurat, efektif, real-time, timely based terkait program Smart City di Kabupaten Badung. "Visi dari Smart City Kabupaten Badung ini didasari oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik, dengan tetap mempertahankan seni budaya Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana," terang Weda Dharmaja, Jumat (11/1).
(made dwija putra/yor)

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 4



Radar Bali

Sambungan

Anggaran Dari Hasil Bagi Pajak

■ DUMDUMAN...

Sambungan dari hal 1

"Anggarannya itu dari masing-masing desa. Mobil itu nanti untuk operasional di desa," ujarnya, Jumat kemarin (11/1).

Untuk anggarannya, nanti masing-masing desa yang menanggung. Anggaran diperoleh dari Bagi Hasil Pajak (BAP) Kabupaten Gianyar. Total dana BAP untuk seluruh desa di Kabupaten Gianyar pada 2019 ini, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. "Tahun 2018 bagi hasil pajak itu Rp 53 miliar. Menjadi Rp 72 miliar lebih. Jadi jumlah itu naik sekitar Rp 19 miliar," jelasnya.

Kata dia, seluruh BAP yang mencapai Rp 72 miliar lebih telah dibagi ke masing-masing desa di Kabupaten Gianyar. Sesuai dengan perhitungan, berdasarkan kebutuhan, letak geografis, jumlah penduduk miskin, maka setiap desa menerima BAP dalam jumlah berbeda. Namun angkanya

mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar lebih.

Mengenai anggaran mencapai Rp 250 juta, pihaknya belum tahu pasti. "Tentunya nanti akan dirapatkan dalam forum untuk dicari tipe mobil yang harganya di bawah itu, pastinya Xpander itu ada tipenya," jelasnya.

Pengadaan mobil operasional untuk seluruh desa di Kabupaten Gianyar ini memang menjadi kebijakan Bupati Mahayastra. Harapannya agar setiap desa memiliki kendaraan operasional untuk mendukung Gianyar sebagai Kota Layak Anak dan Desa Siaga. "Nanti proses pengadaan barang menggunakan e-katalog, lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Itu dianggarkan di masing masing desa," terangnya.

Selanjutnya mobil ini akan menjadi aset desa, dengan memakai plat merah. Dan plat nomor polisi itu akan ditentukan berdasarkan SK Bupati.

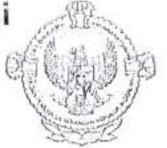
"SK sudah dibuatkan no kode 401 KT, misal 404 KT itu pasti mobil operasional desa di Gianyar yang punya, jadi biar langsung menjadi aset desa," imbuhnya.

Subayasa menegaskan, bahwa mobil Xpander itu nantinya bukan kendaraan bagi perbeker. Melainkan untuk mendukung operasional di desa. Sehingga memudahkan untuk mobilitas setiap kegiatan di desa. "Nanti mobil itu bisa dimanfaatkan masyarakat, misal untuk mendak Pedanda, karena selama ini di desa misalnya mengantar peserta lomba itu pasti pakai mobil pribadi, makanya disiapkan mobil ini," pungkasnya.

Sementara itu, ketua forum perbeker dan lurah se-kabupaten Gianyar, Gusti Ngurah Susila, yang juga perbeker Bona, belum bisa menanggapi mengenai mobil Xpander itu. Pesan whatsapp, pesan singkat hingga sambungan telepon koran ini belum ditanggapi. (dra/rid)

Edisi : _____

Hal. : _____



Radar Bali

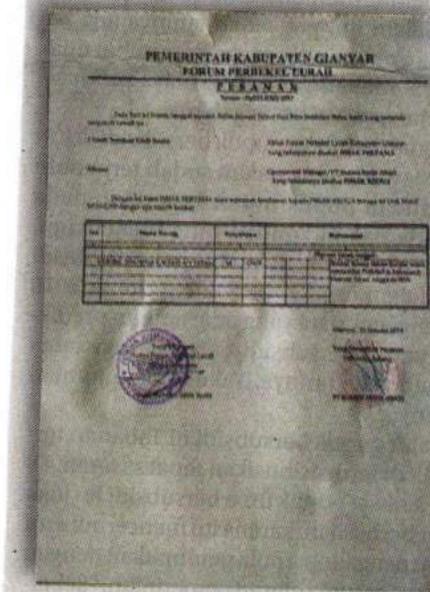
Dumduman Xpander Perbekel Se-Gianyar

Sudah Dipesan, Nilainya Ratusan Juta Per Unit

GIANYAR - Sebanyak 64 perbekel dan lurah di Kabupaten Gianyar sebentar lagi akan mendapat mobil Mitsubishi Xpander Exceed A/T warna hitam. Melalui sepucuk surat, mobil itu sudah dipesan oleh Forum Perbekel se-Kabupaten Gianyar kepada PT Bumen Radja Abadi. Setiap desa yang memesan mobil ini sudah harus menyiapkan anggaran masing-masing Rp 250 juta.

Sekda Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya didampingi Kabid Bina Pemerintahan Desa Wayan Gede Subayasa mengakui forum perbekel dan lurah memesan Xpander. Mobil itu nantinya akan menjadi operasional bagi desa setempat ■

► Baca *Dumduman...* Hal 11

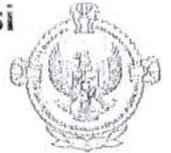


ORDER:
Surat
permintaan
mobil
Mitsubishi
Expander
dari ketua
Forum
Perbekel/
Lurah
seluruh
Gianyar
kepada
perusahaan
mobil.

ISTIMEWA

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 11



Pabrik Limbah Medis Pulukan

Belum Jelas

NEGARA - Rencana pembangunan pabrik limbah medis di desa Pulukan, Pekutatan, masih belum jelas. Sebab, hingga kini belum ada kesepakatan antara investor yang akan mendirikan pabrik limbah medis dengan masyarakat untuk sewa tanah wakaf untuk lokasi pabrik.

Sebelumnya pihak investor memang melirik tanah wakaf milik warga Muslim itu untuk lokasi pabrik. Tanah wakaf yang rencananya akan disewa investor ini berada di pinggir sungai dengan kondisi bertebing, serta jalan yang belum bagus. Informasinya tidak semua masyarakat muslim di Pulukan setuju dengan rencana penyewaan tanah wakaf ini jika digunakan sebagai pabrik untuk mengolah limbah berbahaya seperti limbah medis.

Sampai saat ini pembicaraan lanjutan sewa-menyewa tanah wakaf itu belum ada, sehingga kapan pabrik dibangun juga belum jelas. "Untuk penyewaan tanah wakaf itu masih belum ada pembicaraan final dengan investor yang akan membangun pabrik itu," ujar Ketua Nadzir Wakaf Pulukan Suryanto, Rabu lalu (9/1). Menurutnya, untuk mencari lokasi pabrik, investor datang ke kantor desa menyampaikan maksudnya yang akhirnya mendatangkan tiga lokasi lahan termasuk tanah wakaf. "Selain tanah wakaf ada dua lokasi lahan yang juga dilihat investor. Lahan wakaf kami di lokasi itu sekitar lima



hektare dan rencananya akan disewa sekitar tiga puluh are," ungkapnya. Karena tanah wakaf milik semua masyarakat muslim di Desa Pulukan, maka dalam pengambilan keputusan juga harus melibatkan masyarakat, termasuk lembaga yang mengurus wakaf di kabupaten.

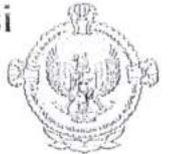
Sementara Sunardi, salah seorang takmir masjid Desa Pulukan yang juga sebagai Kepala Dusun Pulukan mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih panjang karena harus melewati beberapa proses sebelum pengambilan keputusan. Perbekel Pulukan I Wayan Armawa menambahkan, rencana pendirian pabrik pengolahan limbah medis itu masih sebatas wacana dari investor dan belum ada kesepakatan final. **(nom/han)**

TUNGGU PROSES: Tanah wakaf di Desa Pulukan, Pekutatan yang akan jadi lokasi pabrik limbah medis.

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 5



Radar Bali

Dana Promosi Wisata Naik Signifikan

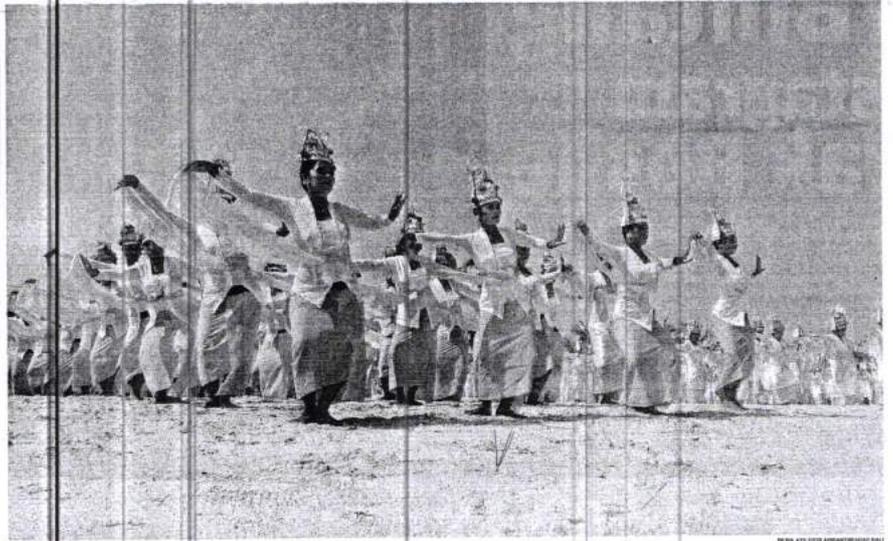
Sayang, Anggaran Tak Cukup untuk Promosi Keluar Negeri

SEMARAPURA - Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung, berbagai kegiatan akan digelar di tahun 2019 untuk mempromosikan industri pariwisata Gumi Serombotan ini.

Bahkan, anggaran yang disiapkan untuk kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Klungkung di tahun 2019 ini, hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, tidak ada kegiatan promosi pariwisata keluar negeri yang akan dilakukan di tahun ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Nengah Sukasta, Minggu (13/1) mengungkapkan, untuk kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Klungkung di tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 3,32 miliar lebih. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar Rp 1,8 miliar meski yang terealisasi hanya berkisar Rp 570 juta lebih lantaran adanya pembatalan sejumlah kegiatan festival seperti Festival Semarapura, dan Festival Nusa Penida. "Yang kemarin tahun 2018 ada beberapa festival yang batal," katanya.

Menurutnya, peningkatan



penganggaran kegiatan promosi pariwisata di tahun 2019 ini, selain mempertimbangkan inflasi juga karena adanya

penambahan dua kegiatan promosi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun di tahun 2019 mendatang akan ada

enam kegiatan promosi seperti melalui Festival Nusa Penida, Festival Semarapura, landmark di Desa Kutampi, Nusa Penida,

Apkasi di luar Bali, Majapahit Travel Mart, dan Atraksi Sct. "Majapahit Travel Mart dan Landmark di Kutampi mer-

upakan kegiatan promosi tambahan di tahun 2019," ungkap mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung itu.

Edisi : Senin, 14 Januari 2019

Hal. : 7



Radar Bali

Sambungan

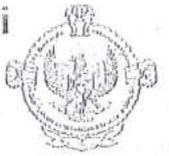
Meski anggaran promosi pariwisata mengalami peningkatan cukup signifikan, menurutnya tidak ada kegiatan promosi pariwisata di luar negeri yang akan dilakukan di tahun 2019. Lantaran anggaran Rp 3,3 miliar tersebut tidak mencukupi untuk melakukan promosi di luar negeri.

Sehingga pihaknya berharap Pemkab Badung yang setiap tahun menggelar kegiatan promosi pariwisata di luar negeri juga turut mempromosikan Kabupaten Klungkung sebagai kabupaten penunjang. "Tahun-tahun sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait hal itu dengan Pemkab Badung. Sebab Pemkab Klungkung tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri karena keterbatasan anggaran," terangnya.

Dengan berbagai kegiatan promosi yang akan dilakukan di tahun 2019, pihaknya berharap target kunjungan dan PAD dari sektor pariwisata dapat terealisasi. Adapun untuk target kunjungan di tahun 2019 mencapai 543.979 orang. Sementara target PAD sebesar Rp 7 miliar lebih. "Sampai saat ini wisatawan Tiongkok cukup banyak berkunjung ke Nusa Penida meski untuk melakukan wisata bahari hanya sehari saja. Sementara wisatawan yang kerap menginap beberapa hari adalah wisatawan Eropa," tandasnya. (ayu/rid)

Edisi : _____

Hal. : _____



Dituntut 5 Tahun, Pengacara Tak kaget

Eks Perbekel Baha Ingkari Pengembalian Uang Korupsi

DENPASAR - Jika wajah I Putu Sentana, mantan Perbekel Desa Baha, Mengwi, Badung, langsung pucat pasi ketika dituntut lima tahun, maka tidak dengan pengacara terdakwa. Penasihat hukum terdakwa I Gusti Putu Suwena mengaku tidak terkejut dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Badung ■

► Baca *Dituntut...* Hal 11

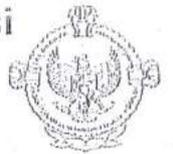


TAK MENYANGKA:
Terdakwa I Putu Sentana, mantan Perbekel Desa Baha, Mengwi, Badung, saat keluar dari ruang sidang Tipikor Denpasar, kemarin.

ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal. : 1



(Sambungan)

Tak Ganti Rugi Jadi Unsur Memberatkan

■ DITUNTUT...

Sambungan dari hal 1

"Saya sebetulnya tidak kaget (tuntutan lima tahun penjara)," ujar Suwena, kemarin (18/1).

Wajar jika Suwena tidak kaget. Sebab, jumlah uang yang dikorupsi kliennya Rp 1 miliar lebih. Tepatnya Rp 1,006 miliar. Uang tersebut merupakan uang APBDes Desa Bahasa 2016 - 2017. Meski demikian, Suwena akan tetap mengupayakan keringanan hukuman sebagaimana yang

dimohonkan terdakwa.

Pledoi atau pembelaan secara tertulis juga sedang disiapkan untuk diperdengarkan dalam sidang berikutnya Rabu depan. "Intinya seperti itu. Kami memohon keringanan hukuman," imbuh Suwena. Materi pledoi masih disusun pihaknya sembari menunggu poin-poin yang mungkin akan ditambahkan terdakwa.

Sejatinya, sebelum perkara ini sampai pada proses hukum, Putu Sentana sendiri

sebetulnya sempat menyatakan permohonan maaf dan bersedia melakukan ganti rugi atas dana APBDes tahun anggaran 2016 yang diselewengkan. Itu terjadi saat muncul hasil audit internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Badung.

Pada poin ganti rugi inilah terdakwa diberatkan. Karena proses ganti rugi nyatanya tidak pernah dilakukan terdakwa. Kendati demikian, sampai batas waktu yang ditentukan, terdakwa rupa-

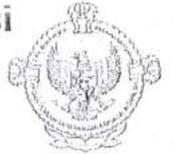
nya tidak kunjung melakukan upaya ganti rugi. Di saat yang sama proses hukumnya sendiri terus berjalan.

Selain dituntut lima tahun penjara, Sentana juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta serta membayar ganti rugi sebesar dana APBDes yang dikorupsinya yakni Rp 1 miliar lebih.

Bila uang pengganti tidak dibayarkan maka dia mengganggantinya dengan hukuman kurungan selama dua setengah tahun. (san/rid)

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal. : _____



Radar Bali

KORUPSI

Anshari Terancam Dicotot

SINGARAJA - Muhammad Anshari terancam dicopot dari jabatannya sebagai Perbekel Celukan Bawang. Saat ini pemerintah masih menanti surat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor dari kejaksaan. Setelah surat itu diterima, Anshari disebut akan dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai perbekel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Made Subur saat dikonfirmasi kemarin (17/1), mengaku pihaknya belum menerima informasi pasti terkait penetapan status Anshari sebagai tersangka. Pihaknya pun sudah meminta informasi dari Camat Gerokgak Made Juartawan, namun hingga kini juga belum ada kepastian.

"Saya sudah ketemu juga dengan Pak Camat. Memang belum ada penjelasan maupun surat dari kejaksaan," kata Subur saat ditemui kemarin (17/1). Menurut Subur dirinya akan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng dan meminta surat penetapan tersangka pada kejaksaan. Surat itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan.

"Kami tunggu surat penetapannya dulu. Yang jelas mekanismenya itu ada berhenti sementara, bisa juga berhenti permanen. Makanya kami akan koordinasikan dengan kejaksaan dulu," imbuh Subur. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 18 Januari 2019

Hal. : 10



Eks Pegawai Perusda Deadline Akhir Januari

- **Kepastian Status dan Sisa Gaji**
- **Dinas Janji Perjuangkan, Direktur Sebut Belum Ada Usaha**

NEGARA - Mantan Pegawai Perusda Jembrana, terus bergerak. Setelah mengadukan masalah pemberhentian ke eksekutif dan legislatif,

mengenai pemberhentian dan gaji yang belum dibayar, mereka tidak mau menunggu lama untuk kepastian. Mereka meminta penyelesaian masalah ini hingga akhir bulan Januari 2019 ini.

Hal tersebut disampaikan perwakilan dari pegawai Perusda Jembrana yang diberhentikan oleh Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya. Karena jika sampai akhir bulan ini, itu berarti genap satu bulan mereka diberhentikan dengan surat nonjob. "Kami minta secepat-cepatnya diselesaikan," kata Yunita,

mantan Kepala Bagian Personalia Perusda Jembrana yang dinonjobkan.

Menurutnya, pada saat pertemuan dengan Komisi B DPRD Jembrana, sudah ditentukan dalam waktu satu minggu sudah ada kepastian. Terutama mengenai status nonjob pegawai dan tanggungan gaji pegawai selama delapan bulan yang belum dibayar Perusda Jembrana. "Kalau dari saya pribadi, akhir bulan Januari ini sudah ada kepastian," tegasnya.

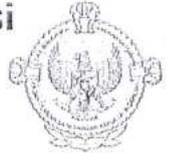
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Jembrana Ni Nengah Wartini menegaskan, akan membantu mantan pegawai perusda Jembrana dan memfasilitasi agar hak-haknya diterima sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Kita memperjuangkan pegawai. Kami sudah memberikan pertimbangan kepada pimpinan, supaya ada kepastian kepegawaian," tegasnya.

Wartini menambahkan, sesuai dengan kewenangan, pihaknya hanya pada ketenagakerjaan. Sedangkan

Edisi : Jumat, 18 Januari 2019

Hal. : 5



Radar Bali

(Sambungan)

mengenai usulan Perda, seperti yang disampaikan saat audiensi dengan Komisi B DPRD Jembrana merupakan kewenangan bagian perekonomian dan pembangunan (Ekbang) yang secara hirarki di bawah Sekda Jembrana.

Jadi, Wartini menegaskan, tindak lanjut setelah pertemuan dengan dewan mengenai status pegawai Perusda Jembrana ada pada bagian Ekbang Setda Jembrana. "Nanti yang akan laporan dan menindaklanjuti bagian ekbang," tegasnya.

Sedangkan Direktur Perusda

Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya mengatakan, mengenai tenggat waktu mantan pegawai tidak bisa dilakukan sampai akhir bulan Januari ini. Karena hingga saat ini belum ada unit usaha yang bisa dikerjakan oleh pegawai. "Kalau mau diterima apa yang mau dikerjakan? Yang mau buat bayar apa? Sekarang tidak ada usaha dan tidak ada uang," ujarnya.

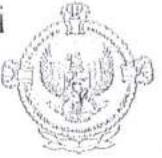
Karena itu, Kusma Wijaya sempat mengusulkan kepada pemerintah kabupaten Jembrana melalui Sekda Jembrana I Made Sudiada, agar menerima pegawai perusda Jembrana yang dinonjobkan

agar menjadi tenaga kontrak. Atau opsi lain, akan memasukkan pegawai yang sudah dinonjobkan masuk kerja lagi secara bertahap ketika ada unit usaha sesuai yang dibutuhkan.

Di samping itu, janji penyertaan modal yang akan diberikan pemerintah kabupaten sebagai pemilik perusahaan direncanakan pada anggaran perubahan APBD Jembrana, sekitar bulan Agustus. "Kalau secepatnya memasukkan pegawai, jujur sekarang tidak bisa. Tunggu unit usahanya dulu," terangnya. **(bas/han)**

Edisi : Jumat, 18 Januari 2019

Hal. : 5



Kasus Tirta Empul Tunggu Inspektorat

GIANYAR-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap petugas tiket Pura Tirta Empul belum rampung. Polisi masih menantikan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Gianyar. Setelah hasil perhitungan dikirim ke Polres barulah melakukan langkah lanjutan.

Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo, menyatakan kasusnya masih menunggu inspektorat. "Masih di Inspektorat," tegas Priyanto. Ditanya kenapa harus membidik bendesa bukan petugas tiket saja? Priyanto mengaku yang bertanggung jawab adalah prajuru paling atas. "Kami *kan* membidik yang bertanggung jawab," ujarnya kemarin (17/1).

Sementara itu, Kasat Rekrim Polres Gianyar, AKP Deni Septiawan menambahkan telah meminta keterangan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) sebagai saksi ahli. "Pemeriksaan hampir rampung, kami tinggal menunggu audit dari Inspektorat," ujarnya.

Kata dia, dari hasil Inspektorat itu, polisi akan mempelajari apakah ada unsur kerugian negara atau tidak. "Apakah digunakan sendiri atau kepentingan desa adat atau kepentingan lain. Kami cek melalui Inspektorat," jelasnya.

Deni mengaku, penanganan kasus korupsi memang butuh waktu yang lebih lama ketimbang kasus pidana lainnya. "Penanganan banyak prosedur, banyak orang yang dimintai keterangan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, Made Juanda menyatakan pihaknya bukan mengaduit namun menghitung berapa dana penjualan tiket yang masuk kabupaten. "Kami hanya diminta untuk menghitung berapa yang masuk ke kas daerah," jelasnya.

Pihaknya tidak mau menyebut berapa rincian dana yang masuk ke kas daerah. Kini pihaknya sedang menunggu petunjuk dari atasannya mengenai langkah lanjutan.

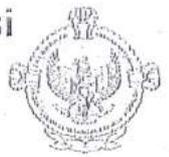
Diberitakan *Jawa Pos Ra-*

dar Bali sebelumnya, dua petugas tiket di Pura Tirta Empul terjaring OTT oleh Satgas Saber Pungli pada 6 November 2018 lalu. Polisi mengamankan tiket yang diterbitkan desa pakraman Manukaya Let. Polisi juga menyita uang tunai yang diduga sebagai hasil penjualan tiket itu.

Selanjutnya, dua petugas tiket dibebaskan. Dalam press rilis di hadapan media massa, polisi menyatakan bendesa Manukaya Let sebagai calon tersangka. Pasca-OTT, pemuangan tiket Tirta Empul kini diambil alih oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Bahkan, harga tiket pun naik dari sebelumnya. (*dra/dot*)

Edisi : Jumat, 18 Januari 2019

Hal. : 2



Dukung Eks Pegawai Gugat Perusda

Dewan Semprot Kadis, Minta Nasib Pegawai Diutamakan

NEGARA - Mantan pegawai Perusda Jembrana yang diberhentikan sepihak oleh Direktur Perusda Jembrana, mengadu ke DPRD Jembrana. Rabu kemarin (16/1), sebanyak delapan orang mantan pegawai yang sudah bekerja plat merah tersebut, meminta kepastian status kepegawaian. Mereka menuntut gaji yang tidak dibayar selama delapan bulan dan mendesak agar direktur diberhentikan.

Mantan pegawai Perusda Jembrana tersebut diterima

Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa. Di samping itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) Jembrana Ni Nengah Wartini juga hadir mendengarkan keluhan kesah mantan pegawai yang diberhentikan melalui surat nonjob sejak akhir tahun 2018 lalu.

Menurut Yunita, salah seorang pegawai mewakili pegawai yang lain, pihaknya berharap apabila direktur tidak mampu memimpin perusahaan agar diganti. Dan meminta tunggakan gaji ditindaklanjuti dibayarkan pada pegawai. "Kami masih bertoleransi bekerja meski tanpa gaji,

tapi akhirnya diberhentikan," jelasnya.

Pada saat mengadukan ke dewan, Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa sempat menegur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Jembrana yang mengatakan bahwa nantinya Perusda akan dibantu modal oleh pemerintah dan membantu sejumlah usaha yang akan dikerjakan. "Masalahnya, sekarang mereka meminta kepastian status kepegawaian mereka dengan status nonjob itu. Soal Perda dan penyertaan modal belakangan dibahas," ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Suheng ini, karena masalah utama status nonjob, mendesak pemerintah memerintahkan direktur agar mencabut surat nonjob yang telah dikeluarkan. Karena status nonjob dalam aturan tidak ada, lebih baik mantan pegawai ini dirumahkan dengan kerja bergiliran. "Tetapi mereka tetap diberi hak gaji," terangnya.

Suheng mendukung jika mantan pegawai ini menggugat Perusda Jembrana ke pengadilan hubungan industrial. Pasalnya, keputusan mengeluarkan surat nonjob merupakan kesalahan besar direktur. Apalagi, keputusan tersebut keputusan sepihak direktur yang tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten Jembrana selaku pemilik perusahaan. "Kalau masalah ini tidak selesai, saya dukung kalian (mantan pegawai) gugat perusda," tegasnya.

Namun, saat ini Suheng masih menunggu keputusan dari pemerintah dan perusda mengenai status pegawai mereka.



ADUKAN NASIB: Mantan pegawai perusda berdialog dengan Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (kanan) dan Kadis PMPTSP dan Naker Ni Nengah Wartini (dua dari kiri), kemarin.

TUNTUTAN EKS PEGAWAI PERUSDA JEMBRANA

- Menuntut kepastian status
- Menuntut tunggakan gaji pegawai diselesaikan
- Menuntut Divul Perusda dicopot
- Menuntut Perusda segera menyelesaikan status eks Pegawai Perusda
- Menuntut eks Pegawai menggugat Perusda ke pengadilan industrial
- Menuntut Perusda segera menyelesaikan status eks Pegawai Perusda
- Menuntut Perusda segera menyelesaikan status eks Pegawai Perusda

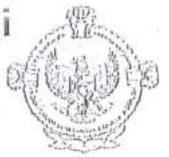
Respons Dewan Jembrana

- Menuntut Perusda

SOURCE: (1) BERKABUPATEN JEMBRANA

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal. : 5



Radar Bali

(Sambungan)

Salah satunya mencabut surat nonjob dan tetap mempekerjakan pegawai dengan tetap menerima gaji sesuai kinerjanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perusda Jembrana bangkrut karena tidak ada usaha yang bisa menghasilkan pendapatan besar. Hanya ada usaha percetakan dan sedot WC. Dengan usaha tersebut tidak ada cukup untuk membayar gaji pegawai, akhirnya sebanyak 10 pegawai dinon-jobkan sedangkan yang lain mengundurkan diri.

Perusda Jembrana juga tidak membayar gaji pegawai selama delapan bulan tahun 2018 lalu, dengan nilai total sebesar Rp 300 juta lebih.

Meski sudah tidak ada usaha, pemerintah kabupaten Jembrana tetap mempertahankan Perusda Jembrana. Langkah yang akan diambil di antaranya adalah rencana bantuan

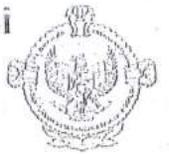
sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan perusda tersebut, pemerintah kabupaten Jembrana akan mem-backup penuh usah-us-

aha yang dilakukan. Misalnya membutuhkan regulasi, akan dibuat regulasi secepatnya. Perusda ditekankan untuk mencari terobosan untuk keberlangsungan Perusda. **(bas/han)**

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal. : 5



KASUS PUNGLI

Jadi Tersangka, Perbekel Gadungan Dinonaktifkan

TABANAN - Perbekel Desa Gadungan, Selemadeg Timur I Wayan Muliartana akhirnya diberhentikan sementara (non-aktif) dari jabatan karena menyadang status tersangka atas kasus pungutan liar (pungli) galian C di desanya. Pemkab Tabanan sudah menunjuk pelaksana tugas (plt) Perbekel Gadungan untuk memperlancar roda pemerintahan dan pelayanan di desa Gadungan. Sesuai aturan, Plt diberikan kepada Sekdes Desa Gadungan. Itu sampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tabanan I Wayan Miarsana usai menyampaikan surat pemberhentian sementara kepada Perbekel Desa Gadungan, yang disaksikan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan dan Camat Selemadeg Timur.

Miarsana menyebutkan dasar pemberhentian sementara Perbekel Gadungan itu sesuai dengan SK Bupati Tabanan Nomor 180/81/04/HK dan HAM/2019 dikeluarkan per 7 Januari 2019. Sesuai aturan Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 82 tahun 2015 yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. "Secara normatif yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai perbekel sehingga roda pemerintahan dapat berjalan. Kami sudah menunjuk pelaksana tugas yakni Sekdes Gadungan Made Rustiaga," jelasnya, Rabu (16/1) kemarin.

Setelah dikeluarkan SK Bupati pemberhentian, Perbekel Desa Gadungan I Wayan Muliartana segala hak-hak yang melekat pada jabatan sebagai perbekel termasuk tunjangan dan gajinya tidak berikan sementara sampai adanya keputusan ingkrah secara hukum. "Apabila nantinya keputusan secara hukum Perbekel Gadungan dinyatakan tak bersalah, maka pemerintah Tabanan berhak melakukan rehabilitasi kembali kepada yang bersangkutan. Kemudian segala hak-hak akan diberikan kembali. Namun, jika bersalah maka sesuai aturan dilakukan pemecatan," terangnya. (uli/dot)

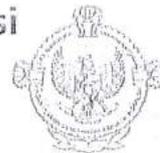


JULIAD/RADAR BALI

I Wayan Muliartana

Edisi : Kamis, 17 Januari 2019

Hal. : 2



Ajukan 140 Berkas Fiktif Dana Kematian

■ DUA KADUS...

Sambungan dari hal 1

Kedua kadus yang ditahan tersebut yakni, I Gede Astawa, Kadus Munduk Ranti dan Dewa Ketut Artawan, Kadus Sarikuning Tulungagung. Mereka ditahan sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus santunan kematian di Desa Tukadaya," terang Wakapolres Jembrana Kompol Komang Budiarta, kemarin (18/1).

Menurut Budiarta, dari hasil

pengembangan kasus yang dilakukan Unit Tipikor Polres Jembrana, kedua Kadus itu bersama-sama dengan Indah Suryaningsih yang sudah divonis Pengadilan Tipikor Denpasar membuat pengajuan fiktif santunan kematian yang mengakibatkan kerugian negara lebih Rp 300 juta.

Pengajuan proposal fiktif santunan kematian yang merupakan program Pemkab Jembrana itu bisa lolos karena peran Indah sebagai verifikator yang bertugas memverifikasi dan validasi dokumen pengajuan santunan kematian. "Dengan

modus ini maka dokumen fiktif yang diajukan itu lolos dan santunan kematian fiktif sebesar Rp 1,5 juta itu dibayarkan oleh Pemkab Jembrana," ungkapnya.

Setelah uang itu cair kemudian oleh mereka dibagi, di mana Indah Suryaningsih mendapat bagian Rp 1 juta. Sementara Artawan dan Astawa mendapatkan Rp 500 ribu. Namun jika Artawan dan Astawa yang membuat dokumen mereka akan mendapat bagian Rp 700 ribu dan Indah Rp 800 ribu.

Mulai kurun waktu bulan Jan-

uari sampai Desember 2015, tersangka Dewa Ketut Artawan mengajukan 140 berkas fiktif dana santunan kematian ke Dinas Sosial Pemkab Jembrana. Dari 140 berkas fiktif santunan kematian yang sudah dicairkan itu Unit Tipikor Polres Jembrana menghitung terdapat kerugian negara sebesar Rp 210 juta. Sedangkan tersangka I Gede Astawa mengajukan 59 berkas fiktif dan sudah dicairkan Dinas Sosial Jembrana dengan kerugian negara Rp 88 juta. "Besarnya kerugian negara itu berdasarkan penghitungan yang dilakukan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bali. Untuk mendapat uang negara itu ada berkas orang meninggal yang diajukan dua kali termasuk juga ada orang yang masih hidup dibuatkan berkas fiktif," jelasnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tipikor Polres Jembrana, Artawan dan Astawa langsung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya itu kedua tersangka dijerat

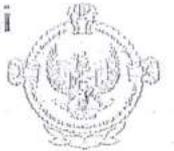
dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut kemudian diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 tahun

dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Barang bukti yang diamankan yakni berkas perkara No BP/48.c/1/2018/Reskrim tanggal 26 Januari 2017 dengan tersangka Indah (berkas perkara split/terpisah). (nom/rid)

Edisi : Sabtu, 19 Januari 2019

Hal. : 11



Dua Kadus di Tukadaya Ditahan

Pengembangan Kasus Korupsi Santunan Kematian

NEGARA - Bak bola liar, setelah Indah Suryaningsih, PNS di Dinas Sosial Pemkab Jembrana diganjar hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, kasus korupsi santunan kematian kini bergulir lagi. Kali ini dua orang kepala dusun (kadus) atau klian banjar di Desa Tukadaya, Melaya, Jembrana yang ditahan ■

► Baca Dua Kadus... Hal 11



BOLA LIAR KASUS KORUPSI SANTUNAN KEMATIAN DESA TUKADAYA, MELAYA, JEMBRANA

- Sebelumnya Pengadilan Tipikor Denpasar telah memvonis PNS Dinas Sosial Pemkab Jembrana Indah Suryaningsih dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan penjara.
- Polisi lalu melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjutan berdasar fakta-fakta persidangan. Hasilnya, diketahui dua kepala dusun (Kadus) di Desa Tukadaya, Jembrana yakni I Gede Astawa, Kadus Munduk Ranti dan Dewa Ketut Artawan, Kadus Sarikuning Tulungagung, ternyata terlibat.
- Mapolres Jembrana sejak Jumat (18/1).
- Motifnya mengajukan berkas pengajuan fiktif santunan kematian ke Dinas Sosial Pemkab Jembrana.
- Hasil kongkalikong dengan Indah Suryaningsih, pengajuan itu lolos validasi dan dana cair dengan jumlah pengajuan sebanyak 140 berkas fiktif.
- Setiap berkas proposal fiktif senilai Rp 1,5 juta x 140 berkas, yang kemudian dibagi-bagi bertiga.

GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI

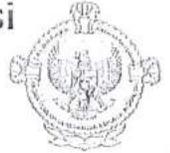


ANOM SUARDANA / RADAR BALI

MENYUSUL: Tersangka kasus dugaan korupsi santunan kematian I Gede Astawa, Kadus Munduk Ranti dan Dewa Ketut Artawan, Kadus Sarikuning, Tulungagung (memakai baju tahanan), Desa Tukadaya, Melaya Jembrana, saat ekspose di Polres Jembrana, kemarin.

Edisi : Sabtu, 19 Januari 2019

Hal. : 1



ANGGARAN DAERAH ✓

**APBD 2018 Meleset,
Bupati Panggil Bapenda**

MANGUPURA- Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Badung 2018 meleset dan mengalami defisit Rp 700 miliar lebih. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung beserta jajarannya untuk melakukan rapat tertutup di Gedung Lantai III Kantor Bupati Badung, Senin (14/1). Dalam rapat tertutup tersebut, Giri Prasta kabarnya memberikan briefing sekaligus warning kepada pejabat dan staf Bapenda agar menggenjot kinerjanya dalam mengoptimalkan potensi pajak. Sayangnya, Bupati Giri Prasta ketika ditemui usai pertemuan enggan berkomentar perihal pertemuannya dengan pejabat dan staf Bapenda Badung. Menurutnya rapat tersebut hanya untuk memberi motivasi kepada Bapenda. "Iya, tadi rapat untuk memberi motivasi kepada Bapenda," ujarnya singkat.

Sementara, I Made Utama selaku Kepala Bapenda Badung membenarnya dirinya bersama jajaran dan staf diberikan pengarahan langsung oleh Bupati Badung. Menurutnya, Bupati menginginkan kinerja Bapenda terus ditingkatkan seiring bertambahnya target pendapatan daerah pada tahun 2019. "Iya, tadi ada pengarahan dari Bapak Bupati. Intinya untuk memotivasi kami di Bapenda supaya tahun 2019 meningkat, tentang pendapatan," ungkapnya.

Ia mengakui, sangat wajar Bupati Giri Prasta memberikan perhatian lebih terhadap kinerja dirinya bersama jajaran. Terlebih, pada tahun 2019 ini target Bapenda cukup berat, yakni untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak mencapai Rp 6,2 triliun. "Ya, biar Bapenda lebih semangat lagi. Bapenda kan jantungnya Badung," terangnya. (dwi/rid)

Edisi : Selasa, 15 Januari 2019

Hal. : 7



Badung Menolak Rencana Proyek



NYOMAN GIRI PRASTA

DOK. RADAR BALI

MANGUPURA - Rencana proyek penambangan pasir pantai di kawasan Cangu untuk reklamasi Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa ditolak. Pemkab Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung tidak merekomendasikan untuk mengeruk pasir di Pantai Cangu. Pertimbangannya adalah karena kawasan Pantai Cangu dan sekitarnya rawan abrasi.

"Usulan dari kami ke Provinsi Bali itu (Pantai Cangu) akan dilakukan normalisasi dengan cara menambah pasir

▶ Baca **Badung...** Hal 11

Seharusnya Tambah Pasir, Bukan Mengeruk

■ BADUNG...

Sambungan dari hal 1

Supaya daratan kita kembali seperti semula. Kalau itu diambil, ya malah tambah abrasi. Harusnya ditambah," tandas Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suamba, saat ditemui, kemarin (14/1).

Usulan untuk menambah pasir tersebut karena berdasarkan data kondisi pantai sebelumnya. Sebab belakangan ini di wilayah pantai tersebut terjadi abrasi. Pemkab Badung pada tahun 2000 juga telah melakukan pendataan pesisir pantai dengan foto udara.

Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, atau setelah 18 tahun kemudian, terjadi pengurangan daratan di pesisir mencapai hingga 100 meter. Atas dasar itu, pihaknya menginginkan normalisasi pantai.

Sehingga nantinya di wilayah

daratan pantai bertambah hingga 100-200 meter. Setelah ada daratan, barangkali nanti ada kebijakan untuk dijadikan sebagai akses jalan Kuta-Tanah Lot.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyikapi munculnya rencana penambangan pasir laut di wilayah Cangu ke utara yang muncul dalam penyusunan dokumen Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali juga tak sepakat. Menurut Giri Prasta, yang perlu dilakukan adalah melakukan normalisasi pantai dengan melakukan penambahan pasir di sepanjang pantai yang mengalami abrasi.

"Hasil kajian Balai Sungai, kondisi pantai kita dari Kuta, Cangu, hingga Seseh daratannya sudah mulai berkurang. Ini akibat terjadinya abrasi. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembenahan dengan melakukan normalisasi,"

terangnya.

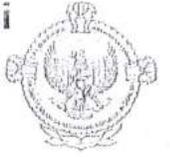
Rencana penambangan pasir laut dengan jarak 4 mil dari bibir pantai, menurut Bupati Giri Prasta tentu akan memperparah terjadinya abrasi. Seharusnya penambangan pasir laut digunakan untuk normalisasi wilayah tersebut, demi pelestarian lingkungan setempat. "Singkatnya, pasir laut yang ditambang digunakan untuk menormalisasi bibir pantai setempat, bukan dipindahkan ke tempat lain," tegasnya.

Seperti diketahui, proyek reklamasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa mengambil pasir dari Pantai Kuta, Kerobokan, dan Cangu.

Luas wilayah yang akan diambil pasirnya mencapai 1.916 hektare. Pasir sebanyak itu akan digunakan untuk reklamasi Bandara Ngurah Rai dengan tambahan 147,66 hektare dan perluasan Pelabuhan Benoa seluas 1.377,41 hektare. (dwi/pit)

Edisi : Selasa, 15 Januari 2019

Hal. : 1



Minim Anggaran, Puluhan Pustu Tidak Terurus

TABANAN-Sebanyak 79 puskesmas pembantu (Pustu) dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan Tabanan. Namun, dari 79 Pustu, 20 di antaranya rusak berat dan kondisinya sangat memprihatikan.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika saat ditemui Senin (14/1) kemarin mengakui jika puluhan Pustu membutuhkan perbaikan total. Terutama kondisi gedung. Saat ini baru lima Pustu mendapatkan perbaikan. Yakni Pustu Pujungan, Pustu Timpag, Pustu Nyambu, Pustu Dauh Peken dan Pustu Desa Tua. Perbaikan pun akan dilakukan secara bertahap, karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Untuk kelima Pustu perbaikannya dengan anggaran bersumber dari ABPD 2019 Tabanan sebesar Rp 2,5 miliar," ucapnya.

Suratmika mengungkapkan, alokasi dana untuk perbaikan berbeda-beda tergantung ringan, sedang, dan beratnya kerusakan di masing-masing



JULIADI/RADAR BALI

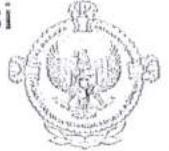
TAK TERURUS: Kondisi bangunan gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Timpag, Kerambitan tampak rusak tak terurus.

pustu. "Pembangunan gedung pustu nanti sesuai dengan aturan Permenkes. Jadi untuk ketahanan jangka panjang," jelasnya.

Masih ada 15 Pustu yang rusak berat dan memerlukan perbaikan. Namun, diakuinya perbaikan secara menyeluruh memang belum bisa dilakukan Pemkab Tabanan karena keterbatasan anggaran. "Meski rusak berat, namun pelayanan Pustu tetap jalan karena masyarakat terutama pedesaan yang jauh dari layanan Puskesmas masih sangat membutuhkan layanan kesehatan dari Pustu," pungkasnya. (uli/dot)

Edisi : Selasa 15 Januari 2019

Hal. : 2



Radar Bali

Dishub Digelontor Rp 1,8 M Beli Alat Uji

TABANAN - Satu unit peralatan uji kendaraan (uji kir) tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan. Pengadaan peralatan uji kendaraan bermotor tersebut saat ini masih persiapan proses lelang.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Agus Hartawiguna mengatakan, penambahan alat uji kir ini nantinya dilengkapi elektronifikasi sistem. Sehingga mempermudah pelayanan kepada pemohon.

Dimana dari data yang ada, dalam sehari rata-rata jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian 80 sampai 100 unit didominasi kendaraan angkutan barang. "Sementara untuk pengadaan alat uji, saat ini sedang mempersiapkan tender, target pertengahan tahun sudah ada alatnya. Nilai anggaran yang dipasang sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber APBD Tabanan," ungkapnya.

Sembari menunggu pemasangan penambahan alat uji, alat uji lama tetap dimanfaatkan. Pengujian kelaikan kendaraan bermotor belum maksimal lantaran alat uji yang dimiliki belum lengkap. "Baru terpasang dan terkalibrasi yaitu *axl load* (timbangan) dan *break tester* (tes pengereman)," terangnya.

Kemudian untuk memenuhi alat uji dasar di tahun ini akan dilengkapi beberapa alat uji lainnya seperti side slip tester with XG cabinet, gas analyzer with XG cabinet, diesel smoke tester, headlight tester, dan sound level tester. "Satu unit alat uji KIR baru sekalian nantinya kami akan lakukan elektronifikasi sistem. Jadi lebih praktis lagi pelayanan ke masyarakat," ujarnya.

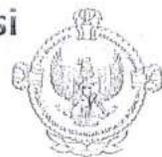
Hal senada disampaikan petugas pengujian Ketut Pujiantara, pegawai Dishub Tabanan. Menurutnya, meski selama ini sudah ada alat uji kelaikan kendaraan, namun belum bisa maksimal. Bahkan untuk pengujian juga ada bagian yang masih dicek secara kasat mata. Misalnya dalam pengujian emisi gas buangan masih bekerjasama dengan pihak ketiga. Di satu sisi jumlah kendaraan yang melakukan uji laik kendaraan rata-rata mencapai 100 unit tiap harinya. "Jadi nanti jika sudah datang alat uji yang baru, tentu sangat membantu sekali apalagi akan dilakukan secara sistem sehingga lebih praktis dan mudah," pungkasnya. (uli/dit)



ALAT BARU: Kendaraan yang melakukan uji KIR Dishub Tabanan.

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal. : 9



Gagal Tender, Pasang Eskalator Molor

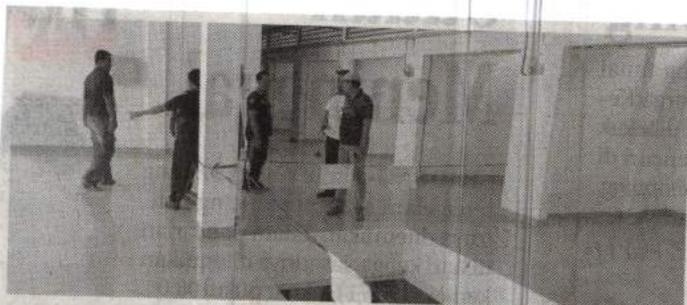
SEMARAPURA - Pemasangan eskalator di Blok A Pasar Semarapura terancam tidak sesuai target. Pasalnya pengadaan eskalator ini sempat gagal tender saat tender pertama. Dan untuk tender kedua kalinya yang berakhir besok (16/1), belum ada peserta tender yang melakukan penawaran hingga Selasa (15/1).

Padahal pemasangan eskalator di Blok A Pasar Semarapura ini ditargetkan rampung bulan April mendatang. Sebab pada bulan April mendatang Blok A Pasar Semarapura rencananya akan diresmikan sekaligus akan digelar pameran produk-produk kerajinan berkaitan dengan peringatan Hari Putupan Klungkung dan HUT Kota Semarapura.

Kepala Bagian Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Klungkung, A.A Gede Lesmana saat ditemui di ruangannya, Selasa (15/1) mengungkapkan, pengumuman tender pertama untuk paket eskalator, CCTV, dan sound system di Blok A Pasar Semarapura dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dari BPK sebesar Rp 1,49 miliar lebih telah dilakukan mulai 18-31 Desember 2018. Namun dari tujuh peserta yang telah mendaftar, tidak satu pun peserta yang mengajukan penawaran hingga hari terakhir. "Sehingga tender pertama gagal," katanya.

Tender kedua kalinya pun dilakukan mulai 9-16 Januari 2019. Adapun peserta yang telah mendaftar hingga kemarin siang, sebanyak 18 peserta. Namun hingga kemarin siang belum ada



DEWA AYU PITRI ARISANTI

PROYEK MOLOR: Situasi Blok A Pasar Semarapura, Klungkung, Selasa (15/1)

yang melakukan penawaran. Jika tender kedua kalinya ini gagal, maka pihaknya akan melakukan analisis pasar untuk mengetahui penyebab kenapa paket ini gagal tender beberapa kali. "Apakah karena harga HPS, informasi yang didapat terbatas, atau karena apa. Setahu kami, penyedia eskalator untuk di wilayah Bali hanya satu saja. Yang banyak itu

di Jakarta, Surabaya, Bandung. Memang jarang proyek pengadaan eskalator di pemerintahan," terangnya.

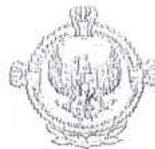
Lebih lanjut diungkapkannya, masa pengerjaan paket ini selama 180 hari. Sehingga tender masih bisa dilakukan hingga bulan Juni mendatang. "Kami berharap tender ini segera ada pemenangnya. Seluruh OPD

sudah berupaya agar proyek yang ada segera terealisasi dengan menggelar tender lebih awal. Namun kondisi yang terjadi seperti ini (gagal tender, red)," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Wayan Ardiasa, mengatakan, pembangunan blok A, Pasar Semarapura yang khusus menjual produk kerajinan seperti kain dan pakaian adat Bali itu dianggarkan sekitar Rp 11 miliar. Namun dalam perjalanannya, dengan anggaran tersebut tidak menjangkau untuk pemasangan satu unit eskalator. Sehingga akhirnya satu unit eskalator ini direncanakan pengadaannya di tahun 2019 ini dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. (ayu/dit)

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal. : 2



36 Kendaraan Lelang Tak Dilengkapi dengan BPKB



TRIBUN BALI/WAYAN ERI GUNARTA

LELANG - Puluhan motor tua terparkir di halaman parkir Pemkab Gianyar, Minggu (13/1). Kendaraan ini akan dilelang pertengahan bulan ini.

GIANYAR, TRIBUN BALI - Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gianyar, pertengahan Januari 2019 ini, akan melelang puluhan kendaraan keluaran tahun 2005 ke bawah. Saat ini, BKAD Gianyar telah mengajukan kendaraan yang dilelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bali.

Berdasarkan informasi, BKAD Gianyar, Minggu (13/1), mengirimkan data lelang ke KPKLN Bali sebanyak 44 unit kendaraan, terdiri dari 43 unit sepeda motor dan satu unit kendaraan roda empat. Dari total tersebut, 13 kendaraan tanpa STNK dan sebanyak 36 ken-

daraan tanpa BPKB.

Semua kendaraan ini keluar dari tahun 1990 sampai 2005. Kendaraan yang masuk dalam bursa lelang kali ini, sebagian besar bekas kendaraan petugas penyuluh pertanian, DPRD Gianyar dan sejumlah dinas di Pemkab Gianyar.

Kepala Bidang Aset BKAD Gianyar, Made Arianta mengaku belum mengetahui jadwal dan sistem lelang yang akan dilakukan. Sebab hal tersebut akan dilakukan langsung oleh pihak KPKNL. Dalam hal ini, pihaknya hanya mengirimkan data kendaraan yang akan dilelang.

Pihaknya tak menampik, sejumlah kendaraan tidak disertai kelengkapan seperti STNK dan BPKB. Sebab kendaraan tersebut usianya sudah tua, dan kerap pindah pemakai sehingga kelengkapan kendaraan menjadi tak diketahui 'rimbanya'.

Untuk Tahun 2019 ini, Pemkab Gianyar kembali mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Daerah Bali untuk mengadakan lelang. Dikatakannya, pengumuman lelang akan diumumkan pertengahan Januari 2019 dan bisa dilihat di web KPKNL.

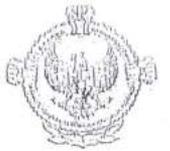
"Ada sebanyak 43 unit sepe-

da motor dan satu unit station wagon untuk dilelang. Datanya sudah dikirim ke KPKNL. Namun saat ini kendaraannya masih di parkir di halaman Pemkab Gianyar, silahkan lihat-lihat, siapa tahu berminat," ujarnya.

Arianta mengungkapkan, sebenarnya kendaraan Pemkab Gianyar yang masuk dalam kategori lelang sebanyak 74 unit kendaraan. Namun sebanyak 30 unit kendaraan tidak masuk dalam daftar lelang kali ini lantaran Dinas Perhubungan (Dishub) Gianyar masih melakukan kajian kerusakan, untuk menentukan tafsiran harga lelang. (weg)

Edisi : Senin, 14 Januari 2019

Hal : 6



Tender Kedua Terancam Gagal Lagi

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Sejumlah pekerja tampak menyelesaikan tahap akhir proyek pembangunan Blok A Pasar Semarapura, Selasa (15/1). Rencananya Pemkab Klungkung untuk melengkapi pasar tradisional tersebut dengan eskalator harus tertunda. Ini karena belum ada satu pun rekanan yang mengajukan penawaran.

Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana menjelaskan, proyek pengadaan eskalator di Blok A Pasar Semarapura dianggarkan Rp 1,5 miliar. Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 1.499.313.299, yang sudah satu paket dengan pemasangan CCTV dan sound system.

Lelang pada tahap pertama sudah dilakukan 18-31 Desember 2018 tapi gagal

Hingga saat ini sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi belum ada juga yang mengajukan penawaran

AA Gede Lesmana
Kabag Pengadaan Barang

tender. Penyebabnya tujuh rekanan yang daftar tidak ada yang mengajukan penawaran "Istilahnya mereka (rekanan) baru 'ngintip' saja," ujar Lesmana, Selasa (15/1).

Kata dia, tidak adanya

rekanan yang mengajukan penawaran tahap pertama ini, diperkirakan karena penyedia eskalator biasanya mengambil proyek swasta. Atas kondisi ini, pemkab kembali membuka pengumuman tender tahap kedua sejak tanggal 9-16 Januari 2019.

"Hingga saat ini sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi belum ada yang mengajukan penawaran. Padahal batas terakhir pengumuman tahap kedua ini besok (hari ini)," ungkap Lesmana.

Namun jika di antara 18 rekanan yang daftar tersebut, ada yang melakukan penawaran dan memenuhi persyaratan, maka penawar itu lah langsung menjadi pemenang tender. "Jika kembali tidak ada penawaran, tentu kami akan melakukan analisis. Mengapa rekanan minim mengajukan penawaran," jelasnya.

Meskipun demikian, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dimungkinkan dilakukan pengumuman tender lagi hingga Juni-Juli 2019. Namun, bangunan Blok A Pasar Semarapura ini rencananya akan diresmikan saat HUT Kota Semarapura, HUT Puputan Klungkung, dan Festival Semarapura April mendatang.

Jadi sangat diharapkan eskalator telah terpasang sebelum itu. "Setelah ada penawaran, itupun kembali berproses selama 1 bulan, baru bisa pengerjaan proyek dengan batas waktu 180 hari (enam bulan)," ungkapnya. (mit)

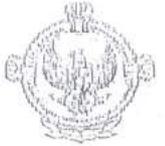


TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

PEMBANGUNAN - Proyek pembangunan Blok A Pasar Semarapura masih dikerjakan, Selasa (15/1).

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal : 5



Dinas PMD Sudah Peringatkan Ashari

- Perbekel Celukan Bawang Tak Koordinasi
- Tukar Guling Lahan Berujung Jerat Kasus

SINGARAJA, TRIBUN BALI

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur akan mendatangi Kejari Buleleng untuk memastikan kebenaran ditetapkan Perbekel Desa Celukan Bawang, Muhamad Ashari sebagai tersangka. Subur mengaku sudah pernah mengingatkan Ashari agar dana ganti rugi lahan masuk ke sumber pendapatan desa.

Ia mengungkapkan, apabila Muhamad Ashari benar menjadi tersangka, maka Dinas PMD Buleleng akan segera melakukan kajian terkait pemberhentiannya sebagai Perbekel Desa Celukan Bawang.

"Apabila surat dari kejaksaan dengan status dia (Muhamad Ashari) sebagai tersangka sudah keluar, maka kami akan membuat sebuah kajian. Kalau disangka lebih dari lima tahun ya akan diberhentikan," ujar Subur, Kamis (17/1).

Terkait pemberhentian, ungkap Subur akan dilakukan apabila sudah ada keputusan dari pihak pengadilan. Selama menunggu keputusan itu, maka Muhamad Ashari akan diberhentikan secara sementara, dan jabatannya akan diisi oleh Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas. Kalau tak salah, sisa masa jabatannya tahun ini.

"Pemberhentian sementara juga ada. Jadi mohon maaf saja, sebab Senin baru saya akan melakukan jemput bola



TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI

MADE SUBUR

mendatangi Kejari," ujar dia.

Subur menyebutkan, Muhamad Ashari memang tidak melakukan koordinasi dengan Dinas PMD Buleleng, saat tukar guling lahan kantor Desa Celukan dengan pihak PT General Energy Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang terjadi. Bahkan pada tahun 2014 pihaknya telah menyampaikan kepada Muhamad Ashari agar dana ganti rugi lahan masuk ke sumber pendapatan desa.

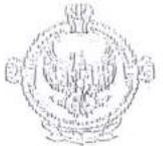
"Kemarin kami sudah melakukan upaya-upaya, memperingati Muhamad Ashari agar seluruh mekanisme diubah menjadi sumber pendapatan desa. Kami sudah sampaikan itu dulu. Nah yang jadi masalah uangnya itu masuk ke rekening pribadi. Setelah bangunan dinilai, ada selisih lagi Rp 200 juta. Ini lah dari proses awal sudah salah sehingga kami sudah carikan alternatif masuk-

kan sebagai sumber pendapatan desa. Itu kan hibah, harusnya masuk APBDes," jelas Subur.

Kejari Buleleng berencana akan memeriksa Muhamad Ashari pekan depan atas perbuatannya yang dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 200 juta. Ashari telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari kemarin. Kendati sudah berstatus tersangka, Kejari merasa perlu menggali keterangan lebih lanjut.

Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip menjelaskan, Muhamad Ashari terbukti menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang pada 2014. Uang itu diberikan sebagai bentuk tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang yang dulu berlokasi di Banjar Dinas Pundukan. Lahan kantor desa terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana Rp 1,2 miliar justru masuk ke rekening pribadi milik Muhamad Ashari bukan ke rekening milik pemerintah Desa Celukan Bawang. Selanjutnya kantor desa pun berpindah tempat dan dibangun di Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh CV Hikmah Laga tanpa melalui proses tender alias ditunjuk secara pribadi oleh Muhamad Ashari. (rtu)



(Sambungan)

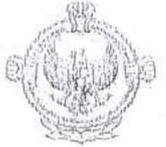
Enggan Tanggapi

TERKAIT kasus ini, *Tribun Bali* mencoba mengkonfirmasi ke Perbekel Desa Celukan Bawang, Muhamad Ashari, ihwal kasus yang menjeratnya. Namun saat akan ditanya, Ashari langsung menjawab, "Sebentar ya, saya lagi kerja," kata dia singkat kemudian menutup sambungan telepon.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengaku belum menerima kabar dari Ke-

jaksaan Negeri (Kejari) Buleleng ihwal ditekannya Perbekel Desa Celukan Bawang, Muhamad Ashari sebagai tersangka. Kendati demikian, Suradnyana berpesan agar Ashari mematuhi proses hukum.

"Saya belum baca surat tembusannya. Saya baca di media (Muhamad Ashari) jadi tersangka. Saya sarankan ikuti proses hukum dan semua berjalan sesuai mekanisme," kata dia. (rtu)



Dewan Minta Kaji Pembangunan Stadion Rp 600 M

● Keuangan Badung Belum Stabil, Masih Nunggu Pihak Ketiga

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Pembangunan stadion bertaraf Internasional di Mengwi, Badung, rencana akan disebut Pemerintah Kabupaten, Badung. Bahkan perencanaannya pun sudah memasuki tahap *feasibility study* (FS), kemudian akan dilanjutkan dengan *detail engineering design* (DED).

Namun DPRD Badung meminta jajaran eksekutif untuk menuntaskan program kebutuhan dasar. Apalagi kondisi keuangan Badung yang belum stabil hingga masih memiliki tunggakan pembayaran pada pihak ketiga.

Bahkan pihak dewan meminta agar jajaran eksekutif mengutamakan yang prioritas untuk Badung, kemudian baru dilanjutkan untuk pembangunan stadion.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung untuk mengatur anggaran dengan baik. Artinya masih bisa diprioritaskan ke hal yang wajib sesuai tema pembangunan Badung tahun 2019, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, ilmu penge-

lahan dan teknologi.

Selain itu juga terkait kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

"Ketua TAPD yang juga Sekda Badung mempunyai peran maksimal untuk mengatur (anggaran). Oke kita bangun stadion tetapi ada sejumlah tagihan yang belum dibayarkan tentu itu harus dialokasikan dulu," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (18/1).

Politisi PDIP Badung asal Dalung itu mengaku bukan tidak setuju untuk pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Hanya saja harus melihat tema pembangunan Badung yang menjadi prioritas.

Ia pun mencontohkan bahwa sekarang saja ketika memasuki musim hujan, Badung dilanda banjir. Tentu masalah hal ini harus menjadi prioritas. Begitu juga masalah kesehatan dalam hal ini rumah sakit juga harus representatif.

"Pada prinsipnya kami mendukung (pembangunan stadion, red) tapi pada pelaksanaannya harus sekala

prioritas sesuai tema pembangunan Badung. Kalau pembangunan rumah sakit itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra mengakui Badung bakal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali tahun 2021 tentu stadion juga dibutuhkan untuk menunjang sarana prasarana olahraga. Namun ia juga sepakat, kalau ada kebutuhan yang mendesak tentu itu yang menjadi prioritas.

"Kalau ada mendesak program kebutuhan dasar tentu itu yang diutamakan dilakukan. Namun kalau bisa, ya sama-sama jalan, kan bagus iya. jadi intinya harus direncanakan dengan matang dan dikaji dulu lah pembangunan stadion itu," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakui untuk persiapan pembangunan stadion rencananya baru masuk tahap FS di tahun 2019 dan ini masih akan proses tender.

"Untuk FS dan DED dilakukan di tahun 2019. Sekarang masih proses tender FS, setelah itu baru dilanjutkan DED," akunya

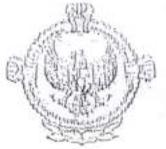
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya menerangkan, Pemkab Badung memprioritaskan dua pembangunan, yakni gedung di Rumah Sakit dan stadion bertaraf internasional di Mengwi Badung.

Pihaknya pun mengakui bahwa pelaksanaan fisik pembangunan stadion tersebut ditargetkan bisa terlaksana tahun 2020.

"Stadion Mengwi jadi prioritas. Sekarang proses penyusunan DED. Dananya sudah kita pasang tahun 2019 ini," jelas mantan Sekretaris DPRD Badung ini.

Stadion ini akan dibangun bertaraf internasional dengan menyulap dan memperluas GOR Mengwi. Pembangunan stadion ini diperkirakan menelan dana Rp 600 miliar.

Stadion megah ini salah satunya diproyeksikan untuk pelaksanaan Porprov tahun 2021 di Badung. (gus)



Tender Kedua Terancam Gagal Lagi

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Sejumlah pekerja tampak menyelesaikan tahap akhir proyek pembangunan Blok A Pasar Semarapura, Selasa (15/1). Rencananya Pemkab Klungkung untuk melengkapi pasar tradisional tersebut dengan eskalator harus tertunda. Ini karena belum ada satu pun rekanan yang mengajukan penawaran.

Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana menjelaskan, proyek pengadaan eskalator di Blok A Pasar Semarapura dianggarkan Rp 1,5 miliar. Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 1.499.313.299, yang sudah satu paket dengan pemasangan CCTV dan sound system.

Lelang pada tahap pertama sudah dilakukan 18-31 Desember 2018 tapi gagal

Hingga saat ini sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi belum ada juga yang mengajukan penawaran

AA Gede Lesmana
Kabag Pengadaan Barang

tender. Penyebabnya tujuh rekanan yang daftar tidak ada yang mengajukan penawaran "Istilahnya mereka (rekanan) baru 'ngintip' saja," ujar Lesmana, Selasa (15/1).

Kata dia, tidak adanya

rekanan yang mengajukan penawaran tahap pertama ini, diperkirakan karena penyedia eskalator biasanya mengambil proyek swasta. Atas kondisi ini, Pemkab kembali membuka pengumuman tender tahap kedua sejak tanggal 9-16 Januari 2019.

"Hingga saat ini sudah ada 18 rekanan yang daftar, tapi belum ada yang mengajukan penawaran. Padahal batas terakhir pengumuman tahap kedua ini besok (hari ini)," ungkap Lesmana.

Namun jika di antara 18 rekanan yang daftar tersebut, ada yang melakukan penawaran dan memenuhi persyaratan, maka penawar itu lah langsung menjadi pemenang tender. "Jika kembali tidak ada penawaran, tentu kami akan melakukan analisis. Mengapa rekanan minim mengajukan penawaran," jelasnya.

Meskipun demikian, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dimungkinkan dilakukan pengumuman tender lagi hingga Juni-Juli 2019. Namun, bangunan Blok A Pasar Semarapura ini rencananya akan diresmikan saat HUT Kota Semarapura, HUT Puputan Klungkung, dan Festival Semarapura April mendatang.

Jadi sangat diharapkan eskalator telah terpasang sebelum itu. "Setelah ada penawaran, itupun kembali berproses selama 1 bulan, baru bisa pengerjaan proyek dengan batas waktu 180 hari (enam bulan)," ungkapnya. (mit)

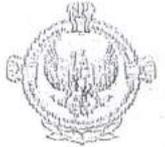


TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

PEMBANGUNAN - Proyek pembangunan Blok A Pasar Semarapura masih dikerjakan, Selasa (15/1).

Edisi : Rabu, 16 Januari 2019

Hal : 5



Gaji dan Tunjangan Muliarta Dicabut

TABANAN, TRIBUN BALI - Perbekel Desa Gadungan, I Wayan Muliartana tampak tergopoh keluar dari ruangan Asisten II Setda Tabanan, Rabu (16/1) pagi. Ia tak mau bicara sepele kata pun ihwal kasus yang membelitnya.

Muliartana dinonaktifkan atau diberhentikan sementara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus pungutan liar (pungli) Galian C di Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan. Untuk sementara, Sekretaris Desa Gadungan, Made Rustiaga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Perbekel Desa Gadungan.

Muliartana dipanggil Asisten II Sekda Tabanan, I Wayan Miarsana terkait kasus pungli tersebut dan sekaligus menyatakan surat pemberhentian sementara yang juga disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Camat



TRIBUN BALI/MADE PRASETYA ARYAWAN

DIBERHENTIKAN - Perbekel Desa Gadungan, I Wayan Muliartana (tengah) tampak berbincang, Rabu (16/1).

Selemadeg Timur. Dengan ini, gaji dan tunjangan juga dicabut sementara.

Miarsana menyebutkan dasar pemberhentian sementara Perbekel Gadungan tersebut sesuai dengan SK Bupati Tabanan Nomor 180/81/04/HK dan HAM/2019 dikeluarkan per 7 Januari 2019. Kemudian juga sesuai dalam aturan Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang peru-

bahan atas Permendagri Nomor 82 tahun 2015 yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

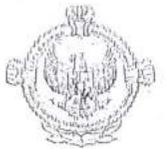
"Dalam pertemuan tadi, dia (Perbekel Gadungan) tak ada komentar. Artinya menerima dengan pemberhentian sementara terhadapnya karena saat ini menyandang status tersangka," ungkap Miarsana.

SK Bupati pemberhenti-

an sementara dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan peraturan dan lebih memberi ruang agar Perbekel Gadungan lebih fokus memberikan keterangan yang diperlukan pihak kepolisian terhadap kasusnya. Selain pemberhentian sementara ini, semua hak-hak yang diterimanya selama ini juga tidak diberikan.

"Segala hak-hak yang melekat pada Perbekel Gadungan termasuk tunjangan dan gajinya tidak diberikan sementara waktu sampai dengan keputusan inkrah secara hukum," imbuhnya.

Miarsana menjelaskan, jika nanti keputusan sudah inkrah dan Perbekel Gadungan dinyatakan tidak bersalah, seluruh hak-haknya yang diberhentikan sementara akan dikembalikan lagi. Dengan catatan pemerintah berhak melakukan rehabilitasi kembali kepada yang bersangkutan.



Sambungan

Hati-hati Kelola Uang

Miarsana mengimbau seluruh perbekel yang ada di Kabupaten Tabanan agar selalu bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah desa juga lebih berhati-hati dalam men-

jalankan kewenangannya, terutama pada pengelolaan keuangan atau APBDes masing-masing. Terlebih lagi anggaran untuk desa dari pusat sangat besar nilainya.

"Termasuk harus terus melakukan koordinasi baik

dengan pihak subak, desa adat, dan tokoh adat masing-masing agar harmonisasi hubungan terjalin dengan baik. Dengan begitu diharapkan kasus serupa tidak terjadi kembali kedepannya," imbaunya. (mpa)

Uang Masuk ke Rekening Pribadi

KEJARI Buleleng berencana akan memeriksa Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Muhamad Ashari pekan depan. Ashari kabarnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari kemarin. Kendati sudah berstatus tersangka, Kejari merasa perlu menggali keterangan lebih lanjut dari tersangka.

"Kami belum minta keterangan yang bersangkutan. Sebelumnya dia (Muhamad Ashari) kami periksa sebagai saksi. Saat ini kami matangkan dulu keterangan saksi dan bukti-bukti, siapa tahu ada keterlibatan pihak lain. Terkait penahanan dan sebagainya, nanti kami lihat. Secepatnya dalam bulan ini harus sudah kelar kasusnya," ungkap Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip, kemarin.

Genip menjelaskan, Muhamad Ashari terbukti menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang pada tahun 2014. Uang itu diberikan se-

bagai bentuk tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang yang dulu berlokasi di Banjar Dinas Pundukan. Lahan kantor desa itu terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana Rp 1,2 miliar itu justru masuk ke rekening pribadi tersangka. Selanjutnya, kantor desa pun berpindah tempat dan dibangun di Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh CV Hikmah Lagas, tanpa melalui proses tender, alias ditunjuk secara pribadi oleh Ashari.

"Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa. Ternyata masuk ke rekening pribadinya. Pelaksana ditunjuk dengan nilai Rp 1 miliar. Tersisa lagi Rp 200 juta yang katanya digunakan untuk kegiatan lain yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Katanya Rp 200 juta itu dipakai untuk beli pintu dan lain sebagainya, tapi bukti pembelian barang itu tidak ada," beber Genip. (rtu)

Edisi : _____

Hal : _____